Sudah Terdaftar
di Dewan Pers.
Surat Izin Penerbitan
Usaha Pers : SK Menkum Ham
Nomor : AHU-62124.AH.01.01
Tahun 2013

Media Online : suaramedianational.co.id
SuaraMedia NasionalCom
@smedianasional

Nomor ISSN : 2355-6501

Surat Kabar Umum

Suara Media Nasional

Bersama Membangun Daerah

Edisi 514
Tahun XIV / 18 April - 8 Mei 2022

Harga Rp. 7000,-
Luar Jawa Harga Rp. 12.000,-

Presiden Jokowi Teken PP Soal THR dan Gaji ke-13 PNS

Ada Tambahan Tukin 50 Persen

"Pencairan THR direncanakan mulai H-10 lebaran," ujar Menkeu Sri Mulyani

Jakarta, SMN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menekan aturan THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Dia mengatakan akan ada tambahan tunjangan kinerja bagi para abdi negara.

"Pada 13 April 2022 saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang pemberian THR

Bersambung di Hal. 11

Bupati ikuti Santapan Rokhani

Tulungagung, SMN - Dalam rangka meningkatkan keimanan di bulan Romadhon 1443 H / tahun 2022 M maka Pemkab Tulungagung menggelar acara Siraman Rohani di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Jum'at 08/04/2022.

Nampak hadir dalam acara yang diikuti karyawan karyawati lingkup Pemkab Tulungagung ini Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M. bersama Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo,SE, Forkopimda dan OPD, sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si serta kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung.

Dalam sambutanya Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM pada acara ini diantarannya mengatakan tidak terasa kita telah memasuki bulan Suci Ramadhan 1443 H / tahun 2022 pada hari yang ke 6 mari kita sambut bulan suci Ramadhan ini dengan penuh suka cita dan mengisinya dengan momentum bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah ini sebagai upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam menumbuhkan kejujuran, keikhlasan, kepedulian sosial, dan melakukan hal baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Selain itu siraman rohani ini sangat bermanfaat guna mempertebal keimanan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah maupun jajaran Forkopimda yang hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Maryoto menambahkan, bulan suci Ramadlan adalah bulan tempat kita memperbaiki diri untuk kembali kepada jati diri kita sebagai seorang hamba yang wajib tunduk dan berserah diri pada semua perintah dan larangan yang datang dari-Nya, dan kita juga mengemban fungsi sebagai khalifah yang bertugas mengelola dan memakmurkan alam semesta dengan segenap isinya. Oleh karena itu, pada hari ini kita berkumpul untuk mengikuti tausiyah Ramadhan agar menambah wawasan, menambah ilmu dan menambah pengetahuan untuk bekal sebagai pengelola alam ini (Kholifah fil ardh)..

Selanjutnya bupati mengharapkan didalam menjalankan ibadah puasa masyarakat tetap menjaga kebersamaan terutama antar umat beragama, dan bagi masyarakat Tulungagung agar bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan Covid-19.

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat memberikan sambutan

Siraman rohani kali ini diisi tausiah dari Ketua PCNU Kh. Abdul Hakim Mustofa diantaranya mengatakan puasa romadhon adalah sarana menggapai ketakwaan, sarana mensyukuri nikmat dan juga melatih diri untuk mengekang jiwa melembutkan hati dan mengendalikan syahwat dan juga memfokuskan hati untuk berdzikir tentang keagungan dan kebesaran Allah menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-Nya. (hms/adv/kan)

"Safari Ramadhan", Bupati Ikfina Serahkan Dana Hibah untuk Masjid serta Mengajak Masyarakat untuk Vaksinasi

Kab. Mojokerto, SMN - Memasuki bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, Forkopimda Kabupaten Mojokerto menggelar Safari Ramadhan. Salah satu agenda yang masuk dalam rangkaian Safari Ramadhan, yakni Shalat Tarawih berjamaah di empat wilayah eks pembantu bupati.

Tujuan pertama agenda shalat tarawih kali ini, berlokasi di Masjid Al Hidayah, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kamis (14/4) malam. Tidak hanya Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saja, turut mendampingi, yakni Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Kapolresta Mojokerto serta para pejabat lainnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyerahkan dana hibah yang secara langsung diserahkan oleh Bupati Mojokerto kepada takmir Masjid Al Hidayah. Pemberian dana hibah ini, diharapkan mampu meningkatkan operasional dan pelayanan Masjid Al Hidayah untuk masyarakat sekitar.

Dengan anggaran senilai dua ratus juta rupiah ini, Bupati Ikfina berharap takmir masjid juga segera membangun kantor masjid untuk mendukung operasional dan pelayanan di Masjid Al Hidayah ini. Hal itu disampaikan Bupati Ikfina dalam sambutannya usai menunaikan ibadah shalat tarawih berjamaah.

"Semoga setelah dibangunya kantor, operasional masjid semakin tertata dengan manajemen yang baik, pelayanan takmir kepada jamaah yang memanfaatkan masjid, dan yang ibadah semakin bagus dan masyarakat juga semakin semangat untuk meramaikan Masjid Al Hidayah ini untuk kegiatan ibadahnya sehari-hari," harapannya.

Bupati Ikfina saat menyerahkan Bantuan Dana Hibah Tahun 2022 kepada Takmir Masjid Al Hidayah

Selain itu, Ikfina menjelaskan, dalam menjalankan ibadah puasa ini, masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat memanfaatkan tempat ibadah dengan maksimal. Mengingat kapasitas masjid sudah diizinkan untuk digunakan 100 persen.

"Kita boleh melakukan ibadah dengan kapasitas 100 persen, karena Kabupaten Mojokerto saat ini masuk dalam kategori PPKM level satu, dan hanya tujuh kabupaten kota se-Jawa Timur yang masuk PPKM level satu," tuturnya.

Lebih lanjut, Ikfina mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Mojokerto pada PPKM level satu, dengan cara menaati protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga.

"Saya minta tolong, semuanya saja, untuk sama-sama saling menjaga, bagaimana caranya semua masyarakat sudah vaksin dosis satu, vaksin dosis dua, dan saat ini juga sudah ada vaksin dosis ketiga," ucapnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini juga mengumumkan, dalam tahun ini pemerintah telah menetapkan bahwa tidak ada larangan untuk mudik. Tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Pemerintah tidak membatasi perjalanan antar daerah, jadi saat Hari Raya Idul Fitri nanti mudik boleh, dengan persyaratan yang datang, yang mudik, harus sudah vaksin sebanyak tiga kali," tukasnya. (adv/kmf/kan)

Tampak hadir dalam rapat, Sunarto Ketua DPRD Ponorogo, Lisdyarita Wakil Bupati, Agus Pramono Sekda, OPD trrkait, Forkopimda dan segenap undangan yang hadir.

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Tentang Perubahan dan Pembaharuan Raperda

Ponorogo, SMN - DPRD Kabupaten Ponorogo gelar sidang Paripurna, yang ke sekian kali, bertempat di Aula Sidang pada hari Senin (4/4). Giat Paripurna Tersebut terkait penyampaian usulan Raperda RT/RW tahun 2022-2042, Penyampaian usulan Raperda pencabutan Perda nomor 2 tahun 2013, tentang Izin Usaha jasa konstruksi dan Penyampaian usulan Raperda pencabutan perda nomor 4 tahun 2008 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

Tampak hadir dalam agenda,Sunarto Ketua DPRD Ponorogo, Lisdyarita Wakil Bupati, Agus Pramono Sekda, OPD trrkait, Forkopimda dan segenap undangan yang hadir.

Lisdyarita Wabup dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa dalam Sidang Paripurna tersebut disampaikannya usulan 3 Raperda. Pertama tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Adapun tujuan dari hal tersebut diatas adalah penataan ruang antara lain terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan sehingga kedepan terwujud keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan penataan ruang sendiri bertujuan mengatur pemanfaatan ruang agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, jelasnya.

Menurutnya, pengajuan Raperda Mengenai Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan tersebut memiliki latar belakang adanya perubahan regulasi di tingkatan lebih tinggi serta penataan lembaga kemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang pada perkembangannya, sejak tanggal 27 April tahun 2018 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, paparnya.

Lisdyarita berharap dengan adanya pembaharuan ini nantinya kedepan dapat mempermudah masyarakat Ponorogo dalam mengurus segala hal dalam kesehariannya, pungkasnya.

Sementara itu Sunarto Orang nomor satu di DPRD Ponorogo mengatakan, pihaknya sepakat melakukan Revisi karena sudah banyak perubahan fakta di lapangan, pasalnya pihaknya juga sering memgalami kesulitan baik pembangunan maupun investasi.

Dalam hal ini Sunarto juga berharap setelah direvisi dan disesuaikannya 3 Raperda tersebut dapat mempermudah investasi, "Contohnya dulu itu, yang dulunya tanah sawah sekarang sudah berdiri perumahan dan itu jelas tidak berijin, karena secara regulasi memang tidak boleh beralih fungsi, artinya yang peruntukannya tanah sawah ya fungsinya untuk bertanam dan tidak boleh beralih fungsi," Tegas Sunarto."Oleh karena itu dengan adanya Perda ini diharapan bisa ber imbas dan bisa di proses ijinnya, sehingga nanti akan berdampak pada penambahan PAD," pungkas Sunarto. (WIED/ADV/DPRD)

Suasana sidang Paripurna di Aula Sidang pada hari Senin (4/4)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Pembukaan Kembali RTH Kanigoro, Bupati Blitar: Manfaatkan Fasilitas RTH Kanigoro Dengan Baik

"Mereka para UMKM harus diberi ruang untuk memasarkan produksinya, salah satunya di RTH Kanigoro ini"

Blitar, SMN - Bupati Blitar Rini Syarifah resmikan pembukaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro, Selasa (12/04/2022). Pembukaan itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Rini Syarifah didampingi Sekda Kabupaten Blitar, Ketua Dekranasda Kab. Blitar, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Blitar.

Bupati Rini Syarifah menyampaikan bahwa pembukaan kembali RTH Kanigoro ini merupakan bukti semua pihak berkomitmen memulihkan ekonomi dimasa pandemi sekaligus mendukung dan menyambut baik Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang mana pandemi covid ini sangat berdampak pada segala bidang, baik ekonomi maupun sosial, berbagai upaya dilakukan agar ekonomi pulih kembali.

"Agar bisa bertahan ditengah pandemi para pelaku UMKM harus mendapat dorongan dari seluruh pihak, mengingat UMKM berperan begitu penting untuk menopang ekonomi bangsa, khususnya pada perekonomian daerah," ungkap Bupati Rini.

Lebih lanjut disampaikan, mereka para UMKM harus diberi ruang untuk memasarkan produksinya, salah satunya di RTH Kanigoro ini, tempat ini sangat tepat karena berada di tengah ibu kota Kabupaten Blitar," jelasnya.

Diharapkan kepada UMKM dengan fasilitas yang ada di RTH Kanigoro bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak hanya memenuhi pasar lokal, namun harus berusaha menembus pasar nasional, bahkan global.

Bupati Rini berpesan kepada masyarakat supaya pengunjung RTH Kanigoro untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. "Pastikan sampah sudah terpilah di area ini, sehingga tetap rapi dan bersih," tegasnya. (mam/adv/kmf)

Bupati Rini memotong pita saat pembukaan RTH Kanigoro

Pemerintah Desa Bendorejo Salurkan BLT DD, Kades Minoto: Gunakan Bantuan Ini Untuk Membeli Kebutuhan Pokok

Kades Bendorejo Minoto saat memberikan bantuan BLT DD

Blitar, SMN - Pemerintah Desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap ke-4, Rabu (13/04/2022), bertempat di gedung aula Desa Bendorejo. Penyaluran BLT DD di buka secara langsung oleh Kepala Desa Bendorejo Muhammad Minoto serta dihadiri oleh Babhinkamtibmas, Pendamping lokal desa dan perangkat.

Kepala Desa Bendorejo Minoto menyampaikan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT DD ada 83 orang, yang mana masing-masing KPM menerima uang tunai sebesar Rp.300.000, penyaluran BLT DD ini akan di berikan selama 12 kali.

"Untuk kriteria penerima BLT DD ini adalah yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari manapun dan orang yang tidak mampu. Diharapkan masyarakat penerima bantuan ini supaya membeli kebutuhan pokok, yang mana saat ini masih dalam masa pandemi covid,"terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, "selain penyaluran BLT DD, program Desa Bendorejo adalah pemberdayaan masyarakat, yang mana sudah diadakan pelatihan pembuatan souvenir untuk orang hajatan dan membentuk Kelompok Tani Wanita Mekar Sari Anggrek, untuk kedepan Desa Bendorejo juga akan membentuk Kelompok Tani Wanita yang berbentuk Green House untuk penanaman sayur secara organik," ungkapnya.

Untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bendirejo sebetulnya akan membangun gedung serbaguna, karena ada BLT DD yang harus 40%, maka pembangunan gedung serbaguna dihentikan terlebih dahulu.

Kades Minoto berpesan kepada masyarakat Desa Bendorejo yang menerima bantuan, jangan mengharapkan terus bantuan dari pemerintah, karena bantuan ini sewaktu-waktu bisa saja tidak dianggarkan oleh pemerintah, apabila nantinya BLT DD ini sudah tidak ada masyarakat biar tidak kaget," jelasnya. (mam)

Rehab Balai Pertemuan, Pemerintah Desa Kedungbanteng Ingin Tempat Pelayanan Lebih Baik

Blitar, SMN - Pemerintah Desa Kedungbanteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar melaksanakan rehab balai pertemuan, hal ini dilakukan karena jika musim penghujan balai pertemuan ini sering bocor, karena balai pertemuan ini sering dipakai untuk kegiatan yang ada di Pemerintah Desa Kedungbanteng.

Gunawan Prasetyo Budi Sekretaris Desa Kedungbanteng saat dikonfirmasi, Kamis (14/04/2022) menyampaikan sesuai dengan kesepakatan di Musdes Desa Kedungbanteng bahwa untuk tahun anggaran 2022 ini rehab balai pertemuan direalisasikan, karena balai pertemuan ini sangatlah penting untuk sentra pelayanan.

Balai pertemuan di Desa Kedungbanteng ini biasanya dipergunakan untuk rapat, kegiatan vaksinasi, penyaluran BLT DD, untuk anggaran yang di pakai sebesar Rp.119.223.200 yang diambilkan dari Dana Desa,"ungkap Gunawan.

Diharapkan dengan adanya rehab balai pertemuan ini nantinya mampu menunjang pelayanan yang ada di Desa Kedungbanteng dan balai pertemuan ini merupakan tambahan yang sangat positif mengingat tempatnya berada di depan.

Lebih lanjut disampaikan untuk tahun 2022 ini pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kedungbanteng sangat minim, karena Dana Desa dibatasi, 40% harus digunakan untuk penyaluran BLT DD, 20% ketahanan pangan dan 6% untuk penanganan cobid-19.

Balai pertemuan Desa Kedungbanteng yang direhab

Gunawan menambahkan kalau jalan usaha tani yang ada di Desa Kedungbanteng ini banyak yang belum layak untuk dilewati, mengingat rata-rata masyarakat yang ada di Desa Kedungbanteng ini adalah petani, akan tetapi yang menjadikan kendala adalah anggaran, maka dari itu selain dari dana desa, nantinya juga akan mengakses anggaran dari pemerintah daerah. perlu diketahui untuk akses utama yang perlu di bangun jalan usaha tani ada 5 titik," jelasnya. (mam)

Penerbit :
PT. SUARA MEDIA NASIONAL
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers :
SK Menkum Ham
Nomor : AHU-62124. AH.01.01
Tahun 2013.

Penanggung jawab :
Kanti Wiyoto

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No.143 Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. **Ombosman :** Mujianto SE. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Kundari Pri Susanti S.T., Hartono Basingkem, Mardianto, Setiawan. Redaktur: Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Munjidul Ibad. Humas: Futi'ah SE. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail, Yusuf, Istianingsih. **Manager Marketing:** M. Edy Fathurokim, M. Yusuf Maulana. **Marketing**: Kharis Abdullah,. Crew dan Wartawan: Kota/Kab. **Kediri**: M. Ali Faizin, M. S hulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Agus B., Dwi Asmawati. Puguh Santoso. **Blitar** Kota/Kab: Agus Imam S. Eko Setyo Budi, Hari Pramono. **Tulungagung/Trenggalek**: Yusuf. Bangkalan, Pamekasan, **Sampang**: Wahyudi Hermawan, **Sumenep**: Nurhasan, Muhammad Syarief H, H.Achmad. **Mojokerto**: Abdul Hufron Sholeh. **Jombang**: Slamet W, Puji, **Surabaya** : Wijoto. **Nganjuk** : E. Widyantoro, BF Agung W. **Madiun/Ponorogo**: Drs. Suyanto. **Ngawi**: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. **Kota/Kab. Probolinggo**: Edi Sunarko RD, Sutik. **Lumajang** : Atiek. **Perwakilan Jawa Tengah :** Suroto Anto S, **Kab. Demak** Nurkholis. **Kab. Rembang :** Orsal **Bandung :** Aldi R Panjaitan**. Biro Sukabumi**: Roby Cahyadi(biro). **Malang Raya :** C. Junaedi. **Biro Pasuruan Raya :** Haidir Sabaruddin (Kabiro). **Perwakilan Kaltim dan Kaltara** : Syahraini. **Kabupaten Tangerang**: Nurhasan. **Kota/Kab. Bekasi**: Anto, Ictor Marudut. **Purwakarta/Subang/Karawang:** Yatmono. **Kabupaten Karimun**: Timbul Maradona. H. **Biro Tanjung Pinang**: J. Parlindungan Hutasoit. **Sulawesi Selatan:** Andi M. **Batam:** Parulian H.S., **Kab. Oki:** Buriat

No.Rekening **BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271 01 002959505. A/n. Winarti** . No.Rekening **Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N. Winarti**. No.Rekening **Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0781000922. A/N : PT. Suara Media Nasional. Website : www.suaramedianasional.co.id. Email : suaramedianasional@gmail.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Alamat Percetakan :** Jl. Brigjend Katamso No. 45, Waru Sidoarjo Jawa Timur . **Telp. (031) 8678308.** Isi diluar tanggung jawab percetakan.. **Waspadai Waratawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Press yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi.** Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta Informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami dengan identitas diri ke Kantor Pusat "SUARA MEDIA NASIONAL" di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp. Fax.(0354) 2897707, 081333002657, 085645867811. **Admin SMN** :081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkann order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi "SUARA MEDIA NASIONAL". ***Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari narasumber.***

Semua Wartawan SKU Suara Media Nasional dilengkapi dengan Kartu Pers Surat Tugas, Surat Penempatan dan tercantum didalam box redaksi di atas.
Kami mohon kepada sumber berita supaya bijak dan teliti untuk menanyakan identitas wartawan yang datang.
Wartawan SKU Suara Media Nasional dalam menjalankan tugas dilengkapi dengan tanda pengenal,
dilarang terima suap, punya hak tolak jawab, dilarang melakukan pengancaman dan pemerasan, dilarang terlibat aktivitas kriminal.
Jika ada yang mengatasnamakan SKU Suara Media Nasional namun tidak tercantum dalam redaksi atau ada tindakan yang dinilai merugikan pihak lain dengan tindakan melanggar hukum positif Indonesia, dapat menghubungi kontak diatas.
Wartawan SKU Suara Media Nasional tidak diperkenankan menerima dan atau meminta imbalan dengan alasan apapun dari Narasumber.
TIDAK TERCATAT DI DALAM BOX REDAKSI INI BUKAN WARTAWAN KAMI..!!!

"Jika pers merugikan,jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers"
Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional (Dewan Pers).
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Telp. (021) 35214874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030
Email : **dewanpers@cbn.net.id.** Twitter : **@dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id**

Lantik 85 Pejabat, Mas Dhito : "Harus Punya Empati Terhadap Masyarakat"

Upacara pengangkatan 85 pejabat di Convention Hall Simpang Lima Gumull

Kediri, SMN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melantik dan mengambil sumpah 85 pejabat yang terdiri dari 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 25 Pejabat Administrator dan 54 Pejabat Pengawas. Berlangsung khidmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan acara dilaksanakan di Convention Hall Simpang Lima Gumul.

Dalam sambutannya Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengingatkan kepada pejabat di Pemerintah Kabupaten Kediri harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap lingkungannya. Mas Dhito pun meminta supaya antar dinas saling bersinergi dan membuang kebiasaan ego sektoral.

"Saya minta kepada pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini agar mempunyai rasa, punya hati, kalau Pak Presiden bilang punya sense of crisis, punya empati terhadap masyarakat. Tidak harus menunggu ini tugas siapa atau dinas siapa, tapi segera bertindak laporkan jika ada permasalahan diseluruh wilayah Kabupaten Kediri".

"Misalnya jika ada kelangkaan minyak goreng dipasar tertentu segera laporkan kepada Dinas Perdagangan, jika mengetahui ada kasus stunting segera laporkan kepada dinas DP2KBP3A, jangan sampai diam saja. Kalau lihat persoalan dilapangan itu enggak usah nunggu tupoksinya ini dinasku apa bukan," terangnya.

Mas Dhito menambahkan, ibaratkan sapu lidi. Bilamana lidi satu per satu dipatahkan akan lebih mudah, namun ketika dijadikan satu pasti lebih kuat dan sulit untuk dipatahkan.

Belajar dari sapu lidi, Mas Dhito meminta semua pejabat di pemerintahannya untuk menjadi satu kesatuan, hilangkan sifat ego sektoral, jaga komunikasi antar dinas. Bilamana menemukan persoalan di lapangan dan bukan tugas di dinasnya, hendaknya segera mengkomunikasikan dengan dinas terkait.

"Jadi saya minta keharmonisan, sinergitas, buang ego sektoral, betul-betul bagaimana caranya antar satu dengan lain itu bisa berkomunikasi," tegasnya.

"Saya berpesan kepada para pejabat agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Saya hanya meminta kepada bapak ibu semuanya agar bekerja dengan sepenuh hati, bekerja untuk masyarakat Kabupaten Kediri dan bekerja tanpa pamrih atau ikhlas," pungkasnya. (adv/kmf/kan)

Guna Tingkatkan Profesionalitas ASN, Bupati Kediri Launching Panji CorpU

Mas Dhito dalam acara launching program Panjalu Jayati Corporate University

Kediri, SMN - Guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, hari ini, Selasa (5/4/2022) Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Melaunching Program Panjalu Jayati Corporate University atau disingkat Panji CorpU.

Bertempat di Pendopo Panjalu Jayati, launching salah satu program unggulan dari Mas Bup ini diikuti oleh seluruh kepala OPD se-Kabupaten Kediri baik secara offline maupun Online.

Apa itu Program Panji CorpU? Dijelaskan oleh Mas Bupati, bahwa program ini sudah kita bahas sekitar 1 tahun yang lalu, ketika setiap kepala daerah diwajibkan oleh Kementerian ESDM terkait pemberian materi selama 1 minggu.

"Kemudian pada akhir kegiatan, setiap kepala daerah diwajibkan untuk memaparkan bagaimana untuk melakukan manajemen ASN yang baik dan benar. Maka dari itu, saya bersama kepala BKD Kabupaten Kediri melakukan rapat guna mencari solusinya. Didapatkan sebuah sistem Corporate University terdapat 4 aturan didalamnya yang pertama adalah peningkatan kualifikasi, peningkatan Kompetensi, kinerja dan disiplin kerja," jelasnya.

"Dari 4 hal tersebut sangat berkaitan dengan kompensasi, maka ASN dalam 1 tingkat yang sama bisa mendapatkan kompensasi yang berbeda. Saya minta kepada pak Solikin, Kepala BKD Kabupaten Kediri, pada setiap SKPD dianggarkan untuk pengembangan kompetensi pegawainya masing-masing," Papar Mas Bup.

"Satu minggu kita evaluasi dimana pada hari itu semua ASN harus meluangkan waktunya untuk belajar, disamping rutinitas pekerjaan yang banyak. Karena kalau tidak belajar maka akan tetap melakukan rutinitas terus menerus kita akan tertinggal tidak akan bisa maju," Jelas Mas Bup.

"Pelaksanaan Panji Corporate University ini tidak mudah dan juga tidak sulit, tergantung kepala SKPDnya menerapkan kejajarannya. Ini kalau bisa berjalan dengan baik ini akan menjadi yang terbaru dan pertama di Indonesia," terang Mas Bup.

Usai seremonial launching Program Panjalu Corporate University secara zoom meeting seluruh Kepala OPD mendapatkan tambahan wawasan melalui arahan dari Kemenpan RB melalui Deputi Sumberdaya Manusia Dr. Ir Alex Deny, MM. Dukungan terhadap program ini disampaikan pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dipenghujung acara para kepala OPD mendapat Webinar oleh Dr. Ary Ginanjar Agustian tentang Core Value BerAKHLAK. (adv/kmf/kan)

Mas Dhito memberikan sambutan dalam acara launching program Panjalu Jayati Corporate University

Ringankan Beban Masyarakat, Mbak Chica Usulkan Pasar Murah dan Bantuan Souvenir

Kediri, SMN - Pemerintah bersama TP PKK Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pasar murah dan pemberian souvenir bagi warga tidak mampu dan para lanjut usia. Pasar murah ini merupakan usulan dan inisiasi dari Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito.

Dipagi yang sangat cerah tersebut, Mbak Chica, panggilan akrab ketua TP PKK, didampingi oleh Bupati Kediri Mas Dhito datang menyapa masyarakat Kecamatan Papar yang hadir di Galeri Sentra Industri Kreatif (SIK) Kecamatan Papar (11/4/2022). Secara simbolis Mbak Chica beserta Mas Bupati menyerahkan bantuan souvenir kepada penerima.

Secara simbolis Mbak Chica beserta Mas Bupati menyerahkan bantuan souvenir kepada penerima

Sesuai rencana Kegiatan ini akan dilaksanakan dibeberapa titik selama Bulan Suci Ramadhan dan hari ini adalah yang pertama di Galeri Inkubasi Papar, yang kedua di Desa Kalipang Grogol, kemudian di Desa Mangunrejo Ngadiluwih, ke 4 Desa Babadan Ngancar dan yang terakhir di Desa Ngetrep Kecamatan Mojo.

Dijelaskan oleh Kepala Bagian Perekonomian Dyah Saktiana, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri berusaha menyediakan barang-barang pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya pengendalian inflasi daerah di wilayah Kabupaten Kediri.

"Untuk peserta pasar murah ini di ikuti oleh dinas terkait yang membidangi, TP PKK Kabupaten Kediri dan Dharma Wanita Kab. Kediri, Buloq, PG Mrican dan pihak swasta," terang Bu Nana.

Dalam sambutannya Eriani Annisa Hanindhito Ketua TP PKK Kabupaten Kediri mengatakan pemberian paket souvenir dan pasar murah ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Pemerintah Kabupaten kediri yang utamanya adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan juga untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sehari-sehari.

Paket souvenir yang akan diserahkan kepada penerima berjumlah 125 orang yang terdiri dari beras minyak goreng, abon lele, kecap, telur asin, bawang merah, bawang putih, minuman sari nanas yang merupakan produk UMKM Kab. Kediri. Sasaran penerima adalah warga kurang mampu dan para lanjut usia.

"Kemudian ditambah lagi bantuan 100 paket souvenir dari BRI Cabang Kediri kepada warga tidak mampu dan lanjut usia. Semua bantuan tersebut diharapkan akan dapat meringankan beban hidup masyarakat menjelang hari raya," ungkapnya.

"Pasar murah yang digelar bersama oleh dinas dan instansi terkait yang dimaksudkan bagi masyarakat yang menerima souvenir ataupun yang tidak menerima dapat membeli barang-barang yang biasanya sangat dibutuhkan saat puasa Ramadhan dan Idul Fitri", Paparnya

"Saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjaga agar suasana tetap kondusif dan pada bulan suci Ramadhan ini selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan", pesannya.

Pemotongan pita oleh Bupati Kediri dan Mbak Chica menandai dibukanya kegiatan tersebut yang disambut suka cita dan antusias yang luar biasa oleh masyarakat se kecamatan Papar. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau setiap stand yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. (adv/kmf/kan)

Mas Dhito Bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri Terima Aspirasi Mahasiswa

Kediri, SMN - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto menerima aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (13/4/2022) sore. Dalam aksinya mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

"Rabu 13 April jam 18.20 WIB saya telah menerima 6 tuntutan yang tadi sudah dibacakan dan kami nanti malam ini juga saya bersama dengan Pak Dodi dan Pak Kapolres akan langsung berembug untuk membuatkan surat termasuk nanti terkait tuntutan-tuntutan yang mungkin saya bisa langsung sampaikan kepada menteri terkait," kata Bupati yang akrab disapa Mas Dhito dihadapan para mahasiswa.

Tuntutan mahasiswa itu, pertama menuntut Pemerintah Daerah menurunkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Kedua, menuntut Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kediri untuk menjamin ketersediaan pertalite ron 90 di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Ketiga, menuntut pemerintah memperbaiki sistem tata niaga barang dan jasa, menstabilkan harga pasar dan menindak tegas oknum pasar yang merugikan masyarakat. Empat, menuntut pemerintah dengan meninjau kembali kenaikan PPN dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang pemulihan ekonomi.

Lima, menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang undang-undang IKM, termasuk pasal-pasal yang bermasalah serta berdampak pada sektor hukum, sosial, ekologi, dan lain-lain. Enam, menolak penundaan pemilu dan mengevaluasi beberapa orang dari pemerintah yang mengedarkan wacana tiga periode.

Aksi unjuk rasa mahasiswa itu, semula digelar di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan komplek Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito bersama Ketua DPRD dan Kapolres Kediri menemui para mahasiswa yang menyuarakan aksinya.

Meski turun hujan, mereka tetap bertahan di depan Pemkab Kediri. Namun, karena hujan semakin deras, menggunakan pengeras suara Mas Dhito mempersilahkan semua mahasiswa yang melakukan aksi untuk masuk ke dalam komplek Pemkab Kediri.

Kegiatan dilanjutkan di dalam Lapangan Tenis Indor komplek Pemkab Kediri. Dalam aksi damai itu, setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi, Mas Dhito pun memberikan tanggapan dilanjutkan penandatanganan apa yang menjadi tuntutan peserta aksi.

Mas Dhito memberikan tanggapan dan menandatangani apa yang menjadi tuntutan peserta aksi mahasiswa

Selain Mas Dhito dan Ketua DPRD, penandatanganan tuntutan mahasiswa itu dilakukan pula oleh Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho dan Ketua Umum PC PMII Kediri Muhammad Eko Yulianto.

"Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi yang pertama permohonan maaf dari Pemerintah Kabupaten kalau kami masih dirasa kerja kurang maksimal, tapi bahwa kami tidak mungkin blenjani rakyat. Itu satu hal yang tolong dipegang betul," tegas Mas Dhito.

Usai aksi mahasiswa itu selesai, Muhammad Eko Yulianto menyampaikan syukur karena separuh tuntutannya membuahkan hasil. Diakui, tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan ditujukan kepada pemerintah pusat dan dititipkan kepada pemerintah daerah.

"Alhamdulilah pemerintah daerah baik itu Bupati, Ketua DPRD maupun Kapolres sudah bersedia ataupun mengijabahi tuntutan kami, dan semoga nanti ada kabar baik terkait tuntutan kami dan dijawab pemerintah pusat," ucapnya.

Pihak mahasiswa, lanjut dia, memberikan waktu 3x24 jam kepada pemerintah daerah untuk mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat. Mahasiswa diakui akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutannya tersebut. (adv/kmf/kan)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Pemkab Ngawi Kembali Raih Predikat A untuk Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Kekompakan ASN di Ngawi usai menerima pengumuman atas raihan predikat A dari KemenPAN-RB

Penyerahan predikat A untuk SAKIP dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara hybrid, Selasa (5/4/2022)

Penyerahan predikat A untuk SAKIP dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara hybrid, Selasa (5/4/2022)

Ngawi, SMN - Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih predikat A (memuaskan) atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.

Penyerahan hasil laporan SAKIP dilakukan secara hybrid yang diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono bertempat di Command Center Ngawi, Selasa (05/04/22).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatrur Dan Pegawasan, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melakukan evaluasi SAKIP dan RB,

"Tujuannya adalah memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB serta memberikan saran perbaikan bagi seluruh Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Kementerian PAN-RB, Rini Widyantini, mengatakan bahwa implementasi SAKIP pemerintah juga bagian dari cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

Seluruh instansi pemerintah dituntut dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

"Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran," imbuhnya.

Bagi Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, pencapaian atas predikat SAKIP dengan nilai A itu, bukanlah sebuah akhir dari kinerja aparatur sipil pemerintah. Dia menekankan bahwa administrasi yang baik mampu berdampak pada output dan outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Inovasi-inovasi yang kita hadirkan harus bisa menjadi solusi yang konkret, dan tentu saja harus mengetahui permasalahan real di tingkat lapangan," tuturnya.

Selain itu, Ony Anwar Harsono juga menyebutkan jangan hanya membuat inovasi tetapi tidak memberikan solusi bagi problema yang dirasakan masyarakat.

"Jadi bagaimana inovasi itu benar - benar menyelesaikan permasalahan konkret di lapangan. Inovasi itu cukup beberapa saja tapi excellent dan mengefisiensikan anggaran," tandasnya. (Adv/Kominfo/Ari)

Bantu Petani Basmi Tikus, Babinsa Koramil Bringin Turut Terjun Langsung ke Persawahan Desa Mojo

Ngawi, SMN – Babinsa Koramil Bringin turut terjun langsung ke sawah untuk ikut pembasmian hama tikus, di Desa Mojo, Kecamatan Bringin, (15/4/2022).

Langkah itu sekaligus bentuk dukungan TNI terhadap suksesnya swasembada pangan di desa-desa, khususnya yang berbasis agraris seperti di Kabupaten Ngawi, Jatim.

Danramil Bringin, Kapten Sarji, menegaskan, Babinsa sengaja diturunkan untuk bersama-sama para petani menanggulangi hama tikus yang meresahkan.

"Saat ini metode gropyokan maupun pengobatan, masih digunakan para petani. Kalau gropyokan, cara yag ditempuh ya secara bersama-sama memburu tikus hingga ke liangnya. Kami juga turunkan Babinsa untuk ikut serta dalam gerakan ini," ujarnya.

Bagi Babinsa Bringin, Serda Broto, terjun langsung ke sawah bukanlah hal baru. Dia juga memuji kerjasama dan gotong royong para petani yang sepenanggungan dalam menghadapi serangan hama tikus.

"Adanya pembasmian tikus juga menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong dari para petani. Kita harapkan agar hama tikus dapat diatasi," ungkapnya.

Cara pembasmian tikus ini juga dipadukan dengan pengobatan melalui penyemprotan racun tikus ke liang hewan pengerat itu.

Babinsa Koramil Bringin ikut serta dala pembasmian hama tikus di Desa Mojo

Terjunnya aparat TNI ke lahan sawah para petani, juga diharapkan menjadi penyemangat serta memberikan motivasi bagi semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat. (ari)

Peduli Sesama, Bupati Ponorogo Bersama Notaris Muslim Indonesia Bagikan Sembako

Ponorogo, SMN – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama Notaris Muslim Indonesia (NMI) Korwil Jawa Timur bagikan sembako kepada tukang becak di wilayah Ponorogo, Jum'at (15/4/2022)

Pembagian sembako tersebut dilakukan sebagai bentuk wujud peduli sesama dan saling berbagi di bulan Ramadhan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

Para tukang becak dari berbagai pangkalan ruas jalan di Ponorogo sangat antusias mendatangi Pendopo Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan satu paket sembako dari NMI.

Kang Bupati Sugiri Sancoko mengatakan bahwa ternyata ada Komunitas Notaris Muslim Indonesia yang sudah bertahun-tahun berdiri dan memberikan contoh kebaikan yang luar biasa seperti ini.

"Saya berterima kasih dan berharap agar produk-produknya notaris yang seperti ini bisa menjadikan dakwah yang sangat islami, artinya tidak hanya sah secara hukum Indonesia tetapi juga sesuai dengan syariat", terangnya.

Kang Bupati Sugiri jiga menambahkan, "saya sering menjumpai kadang-kadang sah secara hukum tetapi bertentangan dengan syariat, kalau sudah berada ditangan Notaris Muslim akan semakin jempolan."

Sementara itu Ketua Notaris Muslim Indonesia (NMI) Korwil Jatim, Abdul Rozak menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin tiap tahun saat Ramadhan dan secara bergantian dari kota ke kota se Jawa Timur baik di Kabupaten Ponorogo, Jombang, Sampang, dan kota lainnya.

"Melalui momenteum Ramadhan ini, Notaris Muslim Indonesia (NMI) Korwil Jatim, kegiatan ini sebagai bentuk peduli sesama dan juga sebagai dakwah kami," ujarnya.

Selain kegiatan sosial, Notaris Muslim Indonesia Korwil Jatim juga sering menggelar doa bersama baik antar anggota maupun dengan masyarakat di wilayah Jawa Timur. (*)

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama Notaris Muslim Indonesia (NMI) Korwil Jawa Timur bagikan sembako kepada tukang becak di wilayah Ponorogo

Bupati Ponorogo Bicara Soal Reaktivasi Jalur Kereta Api Madiun-Slahung hingga Solusi TPA Mrican

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kembali memaparkan arah penataan ruang dan wilayah di Ponorogo 20 tahun ke depan.

Kang Giri sapaan akrabnya mengatakan penataan ruang dan wilayah ini harus segera dibahas.

Terutama rencana pembangunan strategis yang melibatkan hajat hidup orang banyak.

Salah satu yang disinggung Kang Giri adalah reaktivasi jalur kereta api (KA) Madiun-Slahung.

Pengaktifan ulang jalur kereta api uap Jaladara di zaman sepur kluthuk itu tak lagi dapat ditawar lantaran sudah tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Jatim dan RTRW Nasional.

"(Reaktivasi KA Madiun-Slahung) ini perlu pembahasan mendalam tentang aset-aset dan infrastruktur yang akan dilewati jalur kereta api ini. Tanpa kecuali dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar," kata Kang Giri, saat rapat Paripurna DPRD Ponorogo menjawab pandangan fraksi-fraksi atas usulan eksekutif mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Sabtu (10/4/2022).

Dalam kesempatan itu, Kang Giri juga membahas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Mrican, Jenangan yang sudah penuh bahkan overload.

Selain memanfaatkan sampah untuk pembuatan briket, kedepan, Sugiri akan mengarahkan pengelolaan sampah pada sistem lahan urug terkendali (controlled landfill).

"TPA baru juga akan dibangun, masih di wilayah Kecamatan Jenangan," lanjut orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo ini.

Selain di hilir, Sugiri juga mendorong pengurangan sampah dari hulu melalui pengolahan limbah rumah tangga di tingkat rukun tetangga (RT).

Serta pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) sampah, TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di seluruh kecamatan.

"Harapannya dari proses ini akan menghasilkan kompos yang bernilai ekonomis," jelas Kang Giri.

Ia juga telah merencanakan perluasan ruang terbuka hijau (RTH) yang berupa taman kota, taman hutan kota, dan taman median jalan di sejumlah titik di sudut Bumi Reog.

Dengan penataan ruang dan wilayah yang apik, Sugiri juga berharap bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya di Ponorogo yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat. (tr)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Safari Ramadan Sekaligus Aspirasi Masyarakat

Sampang, SMN - Pemerintah Kabupaten Sampang kembali melaksanakan Kegiatan Safari Ramadan1443 H dan buka puasa bersama warga. Bertempat di Masjid Al Mubarokah, Dusun Muncek Desa Jrengik Kabupaten Sampang, Kamis (7/4). Kegiatan ini ajang silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus untuk menyerap aspirasi dan inspirasi langsung dari warga khususnya Kecamatan Jrengik Desa Jrengik Dusun Muncek.

Wakil Bupati bersama takmir masjid saat safari ramadan

Hadir mengikuti kegiatan tersebut diantaranya Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Forkopimda Sampang, Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Anggota DPRD Sampang Ubaidillah dan Fathurrosi, Kepala Kemenag Sampang Moh. Ersyad, Direktur PDAM Trunojoyo, Kepala OPD dan Kabag di lingkungan Pemkab Sampang, Dirut PDAM Trunojoyo, Dirut Bank Sampang Syaifullah Asyik, Forkopimcam Jrengik, Kepala Desa, tokoh agama, dan masyarakat Jrengik.

Kegiatan safari Ramadan diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, dilanjutkan dengan menyalurkan dana hibah kepada takmir masjid serta bantuan kepada marbot masjid dan insentif guru ngaji.

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menerima kedatangan rombongan dengan baik. Ia juga meminta kepada warga untuk menyampaikan keluhannya. "Saya ucapkan terimakasih pada warga desa yang telah menyambut kami dengan penuh ramah tamah dan setelah buka bersama dan sholat maghrib kami mewakili Pemerintah Kabupaten Sampang, siap mendengarkan keluh kesah masalah yang terjadi di lingkungan sekitar terutamanya dari segi ekonomi dan infrastuktur, kegiatan ini juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi dengan segenap masyarakat desa demi lancarnya pembangunan di Kabupaten Sampang. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan menuju Kabupaten Sampang yang hebat bermartabat," ungkapnya.

Dikatakan juga, pemerintah akan selalu memperhatikan masyarakatnya. Sehingga pihaknya juga mengharapkan kepada masyarakat bilamana ada inspirasi dan aspirasi untuk kemajuan Sampang untuk aktif menyampaikan kepada pemerintah. Hal itu bisa disampaikan melalui kades maupun tomas setempat. "Peran serta masyarakat sangat penting dalam membangun Kabupaten Sampang semua ini demi kemajuan Sampang, pemerintah akan selalu mengutamkan kepentingan masyarakat di atas segalanya," imbuhnya. (adv/why)

Walikota Menyapa Edisi Tiga Tahun MADA, Maidi Sampaikan Perjalanan Selama Ini

Walikota Madiun H. Maidi dalam acara MENYAPA edisi tiga tahun kepemimpinan MADA

Madiun, SMN - pada 29 April 2022 nanti, kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Madiun, Jawa Timur, H Maidi-Inda Raya (MADA) berjalan tiga tahun.

Berbagai capaian prestasi dan banyak perubahan dalam pembangunan di Kota Madiun, terjadi. Mulai dari hambatan, prestasi, hingga target memajukan kota disampaikan Maidi dalam program "Walikota Menyapa," Selasa 13 April 2022.

Dalam kesempatan ini, walikota mengatakan, dalam memimpin kota selama tiga tahun, salah satu hambatan yang dialami yakni adanya pandemi Covid-19. Terutama terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai refocusing anggaran.

"Anggaran dipangkas untuk Covid, padahal target kita banyak. Maka saya minta pengusaha membantu dengan CSR. Akhirnya pembangunan tetap bisa dijalankan meskipun tertunda. Insyaallah hambatan sudah kita lalui," jelas H. Maidi.

Walikota juga mengatakan, pihaknya memiliki target untuk kota. Salah satunya terkait pembangunan fisik.

"Pemerintahan yang transparan menjadi andalan. Kita terbuka. Dewan juga saya ajak Musrenbang keliling kelurahan supaya semakin dekat dengan masyarakat," terangnya.

Untuk diketahui, terdapat 33 program unggulan yang terangkum dalam Panca Karya di kepemimpinan MADA. Dalam tiga tahun, walikota menyebut sudah hampir semua program terlaksana.

"Alhamdulillah, sudah hampir semua program terlaksana. Memang kita kebut semua di tahun-tahun awal. Saya belum cukup puas. Artinya, masih ada yang harus ditingkatkan. Ada yang harus kita kejar. Dua tahun ini akan saya manfaatkan untuk mengejar itu. Seperti dalam lirik lagu Madiun Nyaman dan Damai, Kota Madiun ini akan (semoga) menjadi kota yang nomor satu di negeri ini," pungkasnya. (sy)

Bupati Madiun Terima Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2021

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menerima rekomendasi dari DPRD Kabupaten Madiun tentang LKPJ Tahun Anggaran 2021

Madiun, SMN - Bupati Madiun, Jawa Timur menerima berkas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2021, Kamis 14 April 2022.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD tersebut, penyerahan rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada para wakil rakyat yang telah memberikan catatan strategis serta rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD, catatan strategis dan rekomendasinya akan kita tindaklanjuti untuk memaksimalkan pelayanan publik dan menyelesaikan masalah yang ada," ucap H. Ahmad Dawami.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menambahkan, jika rekomendasi yang diberikan akan segera dilanjuti agar Kabupaten Madiun lebih baik kedepannya.

"Akan kita tindaklanjuti rekomendasi dari teman-teman dewan untuk Kabupaten Madiun yang lebih baik lagi," jelas H. Hari Wuryanto.

Sebelumnya, Bupati Madiun telah menyampaikan nota pengantar LKPJ, Rabu (23/3) lalu. Pada kesempatan itu, bupati menjelaskan Pendapatan Daerah pada TA 2021 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.884.660.162.097,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.978.493.284.512,37 atau tercapai 104,98%. Secara umum realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 telah melampaui target, baik pada komponen PAD, pendapatan transfer dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dirinya juga menyebutkan belanja daerah, dari rencana sebesar Rp. 2.070.774.769.258,23 terealisasi Rp. 1.866.339.659.267,87 atau tercapai 90,13%. Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2021 berjalan baik berkat dukungan yang sangat besar dari DPRD Kab Madiun terutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif.

Selain itu, bupati juga menjelaskan secara rinci capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2021 . Begitupun pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan di bidang lainnya dijelaskan secara rinci berikut capaiannya.

Bupati menambahkan, penghargaan dari pemerintah memang bukanlah satu-satunya alat ukur dalam pencapaian keberhasilan kinerja kepala daerah, namun bisa menjadi bukti adanya pengakuan yang legal terhadap penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab. Madiun pada 2021 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun provinsi di berbagai bidang sebanyak 13 penghargaan. (sy)

Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota TA 2021, DPRD Apresiasi Capaian Ekonomi

Walikota Madiun H. Maidi menerima Rekomendasi dari DPRD Kota Madiun tentang LKPj TA 2021 dan mengapresiasi capaian ekonomi di Kota Madiun

Madiun, SMN - Jalannya pemerintahan di Kota Madiun, Jawa Timur, tahun anggaran 2021 terbukti cukup baik. Hal itu, dapat dilihat dari naiknya sejumlah indikator penting. Salah satunya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) berada di peringkat tiga Jawa Timur.

''IPM kita naik sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kita masih di peringkat tiga Jawa Timur. Kita masih kalah sama Surabaya dan Malang. Ini sudah luar biasa mengingat mereka punya APBD yang jauh lebih besar," kata Walikota Madiun, H. Maidi, usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ walikota tahun 2021, Kamis 14 April 2022.

Namun, walikota masih belum puas. Hal itu karena masih adanya point yang belum meningkat secara signifikan. Bahkan, ada yang tercatat naik. Seperti angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Madiun sebenarnya masih rendah dibanding daerah lain. Kemiskinan Kota Madiun diurutan 36 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Pun, angka kemiskinan tersebut naik secara nasional karena Covid-19.

''Kita ini kota jasa, ada Covid-19 semua akses ditutup. Pergerakan orang dibatasi. Tak heran, pendapatan masyarakat kita juga turun. Pendapatan per kapita ini salah satu yang menjadi tolak ukur kemiskinan," jelasnya.

Batas kemiskinan di Kota Madiun, lanjutnya, juga tinggi. Masyarakat kategori miskin di Kota Madiun memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp 511 ribu dalam satu bulan. Artinya, masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 17 ribu sehari. Sedangkan di daerah lain batas pendapatan per kapita lebih rendah.

''Seperti di Kabupaten Madiun. Kalau tidak salah pendapatan per kapitanya di angka Rp 400 ribuan. Artinya, orang miskin di kota bisa jadi tidak miskin di daerah lain," ungkapnya. (sy)

Berbagai upaya, paparnya, juga terus dilakukan pemerintah. Salah satunya, dengan memacu ekonomi. Apalagi, saat ini upaya pengendalian Covid-19 juga sudah cukup berhasil.

Maidi menyebut bakal ada sejumlah kelonggaran di masyarakat, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan transaksi perekonomian ke depan.

''Kedua, kita tingkatkan subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Mulai listrik, air, dan lainnya. Kalau pengeluaran mereka kita bantu, pendapatan per kapita mereka akan naik," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, mengatakan, sudah banyak kemajuan di Kota Madiun. Salah satunya, peningkatan dalam hal perekonomian. Namun, di akuinya masih ada sejumlah rekomendasi yang diberikan. Termasuk urusan penekanan kemiskinan maupun pengangguran.

''Karenanya masukan-masukan kita juga lebih berfokus pada upaya penekanan kemiskinan dan pengangguran tersebut," ucap Andi Raya. (sy)

Bupati-Wabup Madiun Gelar Ratas Progres Proyek KPBU Penerangan Jalan

Madiun, SMN - Bupati - Wakil Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Ahmad Dawami-H. Hari Wuryanto didampingi Sekda Pahlawanto dan OPD terkait melaksanakan rapat terbatas capaian pelaksanaan KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU), di Pendopo Muda Graha, Rabu 13 April 2022, malam.

Rapat terbatas proyek KPBU PJU ini juga dihadiri oleh tim simpul KPBU dan tenaga ahli, yang mana proses tahapan sudah sampai pada prakualifikasi dengan hasil terdapat tiga perusahaan yang lolos pada tahapan tersebut.

Proyek ini, memang memakan waktu lama. Pasalnya, berbagai tahapan harus dilaksanakan oleh Pemkab dan harus mendapatkan rekomendasi, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, berharap, proyek ini segera terlaksana. Mengingat kebutuhan PJU di Kabupaten Madiun sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga iklim investasi.

"Kita sudah lama memikirkan penerangan jalan di wilayah Kabupaten Madiun. Tim harus bergerak cepat jangan sampai proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) ini gagal. Kita sudah belajar dari daerah lainnya. Semua harus optimis, karena ini untuk kepentingan masyarakat bersama," ucap H. Ahmad Dawami.

Setelah pelaksanaan tahapan prakualifikasi, paparnya, akan dilaksanakan Laporan Kesiapan Permintaan Penawaran. Yang mana komitmen dari semua pihak harus benar-benar dapat menyakinkan antara Badan Usaha dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Proyek dengan biaya investasi sekitar Rp. 97.873.046.992, dengan periode kerjasama yaitu untuk 1 tahun konstruksi dan 10 (sepuluh) tahun operasi, ini diusulkan untuk memperoleh penjaminan pemerintah dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto pada saat menggelar rapat terbatas progres proyek KPBU penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Madiun

"Bila perlu kita dampingi, kita antar, agar mereka yakin bahwa proyek ini benar-benar kita butuhkan. Pemkab tidak akan mengambil seperserpun keuntungan dari proyek ini. Karena apa, APJ/PJU merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran kita tidak cukup bila langsung mengerjakan proyek besar ini. Oleh sebab itu, skema KPBU inilah yang kita harapkan agar PJU segera terealisasi," tandasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menambahkan, perajalanan proyek ini sudah lama dilakukan. Untuk itu, ia berpesan bila ada kendala segera dilaporkan dan koordinasikan.

"Jangan sampai ada dusta diantara kita. Proyek ini sudah kita gaung-gaungkan kepada masyarakat. Kami berharap pelaksanaan KPBU APJ ini segera terlaksana dan penerangan jalan segera terealisasi," harap H. Hari Wuryanto. (sy)

Desa Kuncen Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun
Mengucapkan :
Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1443 H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Kepala Desa : Purnomo Broto
AYO, LINDUNGI DIRI, KELUARGA DAN NEGARA
DARI COVID - 19 DENGAN PATUHI 5 M
MEMAKAI MASKER
MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK
MENGHINDARI KERUMUNAN
MEMBATASI MOBILISASI & INTERAKSI

JAGADesign
Mengerjakan :
- Nota
- Banner
- Vandel
- Spanduk
- Souvenir
- Buku Yasin
- Kartu Nama
- Sablon Kaos
- Undangan Pernikahan
- Undangan Ulang Tahun
Dsn. Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri
082231838798

Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
Kabupaten Madiun
Mengucapkan :
Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1443 H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Kepala Desa : Agus Pramono
AYO, LINDUNGI DIRI, KELUARGA DAN NEGARA
DARI COVID - 19 DENGAN PATUHI 5 M
MEMAKAI MASKER
MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK
MENGHINDARI KERUMUNAN
MEMBATASI MOBILISASI & INTERAKSI

Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun
Mengucapkan :
Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1443 H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Kepala Desa : Putut Suwarno
AYO, LINDUNGI DIRI, KELUARGA DAN NEGARA
DARI COVID - 19 DENGAN PATUHI 5 M
MEMAKAI MASKER
MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK
MENGHINDARI KERUMUNAN
MEMBATASI MOBILISASI & INTERAKSI

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

TP PKK Kota Probolinggo Serahkan Donasi Gerakan Peduli Semeru

Probolinggo, SMN - TP PKK Kota Probolinggo menyerahkan hasil donasi gerakan peduli Semeru. Diwakili Sekretaris PKK Reni Abbas beserta anggota, rombongan diterima Sekdes Mufidun Alamin di posko pengungsian lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jumat (15/4).

TP PKK dalam kegiatan penyerahan donasi

Sebanyak 332 penerima bantuan uang tunai, dengan rincian 264 KK masing-masing Rp 1 juta, 61 lansia per orang senilai Rp 350 ribu, 2 penyandang disabilitas per orang menerima Rp 400 ribu, dan 5 ibu hamil masing-masing Rp 600 ribu. Jumlah total penggalangan dana sebesar Rp 289 juta.

Sekretaris TP PKK Reni Abbas yang mewakili Walikota dan Ketua TP PKK mengatakan penyerahan tersebut sesuai dengan arahannya. "Alhamdulillah hasil donasi semua pihak yang dikomandoi oleh TP PKK Kota Probolinggo sudah kami serahkan. Karena ini amanah untuk diberikan kepada pengungsi Semeru dan sangat dibutuhkan pada masa seperti sekarang, jelang lebaran, sesuai arahan Bapak Walikota Probolinggo. Kami mewakili beliau dan Ibu Aminah Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan amanah ini," urainya.

Sekdes Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Mufidun Alamin mengatakan jika bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka. "Jangan dilihat nominalnya, tapi nilailah dari kepedulian dari TP PKK Kota Probolinggo ini," katanya pada para pengungsi Semeru.

Amin, panggilan akrab Sekdes ini menuturkan jika warga sudah mulai ada yang bekerja. Namun kondisi masih berada di level siaga 3, jadi keberadaan posko pengungsian ini masih dimanfaatkan. Terutama yang rumahnya tidak bisa ditempati.

Ada beberapa titik posko pengungsi yang dikunjungi, selain di lapangan Penanggal, ada pula di puskesmas, balai desa, dan yang tinggal di rumah warga sekitar.

Indrawati (36) warga Curah Kobokan sangat bersyukur menerima bantuan tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih semoga mendapat ganti rejeki yang lebih banyak," ungkapnya. (ed)

Walikota Probolinggo Kukuhkan Pengurus OPOP Masa Bhakti 2021-2024

Probolinggo, SMN - Walikota Hadi Zainal Abidin mengukuhkan pengurus OPOP Masa Bhakti 2021-2024. Dalam rangka laksanakan program Pemerintah Kota Probolinggo, yang terus berupaya menggeliatkan perekonomian di wilayahnya dengan menggerakkan berbagai sektor termasuk diantaranya pondok pesantren, melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Rabu (13/4).

Pengurus OPOP yaitu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Sedangkan Ketua Harian Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Fitriawati. Dalam pelaksanaannya, tim ini bertugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi dari lembaga terkait, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan OPOP, melakukan seleksi dan menetapkan OPOP serta melaporkan tugasnya pada Walikota.

Walikota Hadi menyampaikan berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang OPOP, bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian umat melalui para santri, ponpes, dan alumni pesantren agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis, diperlukan keterpaduan penguatan dan pengembangan program OPOP. "Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semua mau melangkah ke depan lebih baik lagi. Khususnya di lingkungan ponpes," ujarnya.

Walikota Hadi juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program OPOP harus memiliki rasa tanggung jawab, rasa peduli dan rasa berjuang untuk mewujudkan program yang disusun. "Kepada yang hadir disini, saya harap semua memahami bahwasanya giat ini ada aspek manfaat yang harus kita kembangkan. Pada Perangkat Daerah terkait, bisa mengintervensi untuk terwujudnya pelaksanaan OPOP di Kota Probolinggo berjalan sukses dan mampu mewujudkan pesantren yang berdaya secara ekonomi," harapnya.

Lebih lanjut Walikota Hadi, menambahkan, ponpes dapat menjadi lembaga otonom, mandiri, tangguh dan memiliki usaha dari hulu hingga hilir. Dimana melalui program ini ia mendorong agar pesantren bisa mengembangkan diri di berbagai sektor usaha. Baik itu sektor produksi, konsumsi, pemasaran, jasa maupun keuangan. Usaha mandiri yang dirintis dan dikembangkan pesantren, sejatinya diorientasikan seluruhnya bagi kemaslahatan pesantren dan masyarakat.

Walikota Hadi Zainal Abidin Mengukuhkan para pengurus OPOP

Pesantren memiliki tanggung jawab dalam mendukung kemandirian pesantren dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan, pemikiran kreatif dan inovatif dalam upaya membangun dan memberdayakan potensi sumber daya pondok pesantren dan masyarakat Kota Probolinggo dalam rangka membangun tatanan ekonomi baru di pesantren.

Walikota Hadi juga mengungkapkan keinginannya untuk memiliki gerai untuk memajang hasil OPOP. Keinginan itupun tak pernah absen ia sampaikan pada Gubernur Jatim dan jajarannya, mengingat keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di utara kawasan terminal, dinilainya sangat potensial untuk mewujudkan harapan tersebut. "Asetnya itu ada di pinggir jalan dan panjang (luas). Asal tanahnya boleh dipinjam pakaikan, kita siap bangunkan untuk mewujudkan gerai dimaksud. Semoga segera terwujud," katanya.

Giat Pengukuhan dan Workshop OPOP dengan thema "Membentuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren" Kota Probolinggo, dimulai sekira pukul 10. 30 WIB dengan dihadiri partisipan sebanyak 50 orang.

Kepala DKUPP Fitriawati giat itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM santri di kalangan ponpes, menciptakan kemandirian umat melalui santri para pesantren, alumni dan masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi para pesantren agar terwujud pesantren yang berdaya secara ekonomi. (ed)

Walikota Probolinggo Serahkan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi

Walikota Hadi Zainal Abidin saat Serahkan Jawaban Raperda

Probolinggo, SMN - Walikota Hadi Zainal Abidin hadiri sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban DPRD terhadap pendapat walikota tentang 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD dan penyampaian jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi tentang 2 (dua) Raperda. (14/4)

Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan dari rapat paripurna tentang raperda yang dimulai pada 7 April lalu. Untuk diketahui, 6 raperda yang telah ditetapkan yaitu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Tambahan Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga; Percepatan Pengembangan Industri Kreatif Pemuda; Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota Probolinggo; Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan tentang Induk Pembangunan Kepariwisataan.

Fernanda Zulkarnain, Wakil Ketua 2 DPRD yang juga membuka sidang paripurna tersebut, menawarkan kepada anggota dewan yang hadir, apakah penyampaian jawaban DPRD terhadap pendapat Walikota tentang pembahasan 4 raperda inisiatif DPRD dibacakan atau diserahkan. Sebagian besar anggota pun menjawab untuk diserahkan. David Rosidy, Ketua Bapemperda DPRD pun kemudian menyerahkan jawaban tersebut.

Begitu pula untuk jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi tentang pembahasan dua raperda, juga ikut diserahkan oleh Walikota Habib Hadi Zainal Abidin kepada Ketua DPRD, Abdul Mujib.

Dalam kesempatan tersebut Walikota mengatakan bahwa sidang berjalan lancer. "Sidang paripurna terkait raperda, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan proses pembahasan selanjutnya lancar terus, tepat waktu dan sesuai agenda yang sudah ditetapkan, segera selesai dan kita bisa bahas lainnya," katanya. (ed)

Simpang Empat SMPN III Bangil Belum Miliki Kamera Pengawas (CCTV)

Pasuruan, SMN - Banyak kejahatan yang terjadi di jalanan Kabupaten Pasuruan yang terekam kamera pengawas (CCTV). Yang paling sering termonitor adalah pencurian kendaraan bermotor. Artinya CCTV sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian dalam menyelidiki dan mengungkap para pelaku kejahatan.

Namun sangat disayangkan di simpang empat SMPN 3 Bangil sampai saat ini belum dipasang CCTV, padahal jalur ini sangat ramai dilalui kendaraan apalagi di hari kerja, saat kami menghubungi Agus Hari Wibawa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melalui pesan singkat WhatsApp beliau mengatakan, "iya, banyak titik persimpangan dan titik rawan yang butuh CCTV namun belum tersedia anggarannya." Jumat, (15/04/2022).

"Selain kita tahu bersama CCTV yang dipasang Dishub Kabupaten Pasuruan fungsi utamanya adalah memantau dan mengantisipasi kejahatan jalanan, juga berguna memantau arus lalulintas dan mengantisipasi kemacetan," bebernya.

Saat ini ada 25 titik lokasi yang sudah terpasang CCTV milik Dishub Kabupaten Pasuruan. Namun jumlah tersebut masih kurang.

"Penambahan CCTV di jalan memang diperlukan. Tujuannya, untuk lebih memaksimalkan pemantauan terhadap kondisi jalanan di Kabupaten Pasuruan," tambahnya.

"Pemasangan CCTV dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, setiap titik memerlukan biaya puluhan juta rupiah. Kami belum bisa merealisasikan penambahan CCTV untuk tahun ini. Karena anggaran terbatas," tutupnya. (HS)

Simpang empat SMPN III Bangil Pasuruan

Satreskrim Polres Pasuruan Berhasil Menangkap Pelaku Begal di Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, SMN - Satreskrim Polres Pasuruan berhasil mengungkap kasus "Pencurian disertai dengan Kekerasan (Perampasan)" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Pohdoyong, Dsn. Delik, Ds. Janjangwulung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan.

Tersangka berjumlah 3 orang laki-laki berinisial yakni SF (30), SL (35), dan RS (35). Mereka bertiga merupakan warga Ds. Sapulante, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Sedangkan untuk korban yakni berinisial NM (24) warga Dsn. Ranggeh, Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan.

"Pelaku berhasil dibekuk oleh Tim Resmob Timur yang dipimpin oleh Kanit Jatanras Ipda Bambang Sutejo, S.H. setelah mendapat laporan bahwa tersangka sedang berada di rumahnya di Dsn. Pangloan, Ds. Kemiri, Kec. Puspo" ujar Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adhi Putranto Utomo, S.I.K., Senin (12/04/22).

"Pada tanggal 7 April 2022, pukul 17.00 WIB, ketiga pelaku berboncengan dalam satu motor keliling di jalan raya untuk mencari target, kemudian terlihat Honda Beat warna Orange nopol (N 6263 XA) melintas yang dikendarai saudara NM selaku korban, ketiga pelaku kemudian menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah celurit dan bondet," sambung AKP Adhi.

Setelah mendapat ancaman dari ketiga pelaku, akhirnya korban menyerahkan motornya kepada pelaku yang kemudian langsung dibawa kabur menuju Ds. Sapulante, Kemudian oleh tersangka SF, motor hasil curian dijual dan tersangka RS mendapat upah 500.000 rupiah dari hasil penjualan motor tersebut.

Dari penangkapan pelaku, berhasil diamankan barang bukti yakni 1 buah senjata tajam jenis clurit, 1 unit motor satria warna hitam tanpa nopol, 1 buah jaket warna hitam, dan 1 buah lembar STNK Honda Beat warna Orange dengan nopol N 6263 XA.

Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pasuruan tersebuat semuanya adalah residivis kambuhan, karena mereka semua pernah divonis dalam sidang pengadilan untuk menjalani hukuman rata-rata dua sampai tiga kali hukuman penjara.

"Kini ketiga pelaku beserta barang bukti sudah berhasil diamankan di Mapolres Pasuruan atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara." Tutup Kasat Reskrim Polres Pasuruan. (HS)

Press release penangkapan pelaku begal di Kabupaten Pasuruan oleh Satreskrim Polres Pasuruan

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang Gelar Program BREAKTHROUGH ACTION for COVID-19

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang gelar Program BREAKTHROUGH ACTION for COVID-19, bertempat di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Kamis (14/4/2022)

Lumajang, SMN - Dalam orientasi penggunaan alat bantu KIE (Komunikasi Informasi, Edukasi) Vaksinasi COVID-19 di tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang gelar Program BREAKTHROUGH ACTION for COVID-19, bertempat di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Kamis (14/4/2022).

Hal ini mengacu pada petunjuk dari Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bekerjasama dengan USAID dan Johns Hopkins Center for Communication Programs (JHCCP) dalam program Breakthrough ACTION for COVID-19 (BA for COVID-19).

Menurut Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo Ignasius, program tersebut menangani komunikasi perubahan sosial dan perilaku, terkait dengan penerimaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

"Ada upaya penting yang akan dilakukan, diantaranya kegiatan kampanye dan pelibatan masyarakat, untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan," katanya dalam sambutan pembukaan acara tersebut.

Dan perlu diketahui bersama, pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, termasuk di Jawa Timur apalagi munculnya varian omnicorn.

Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minimal.

"Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian, yang mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd imunity)," tambahnya.

Selain itu, vaksinasi COVID-19 ini, bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 yang tersedia, menggambarkan kesenjangan capaian vaksinasi terhadap kelompok prioritas lansia masih sangat rendah.

Menurut dr Bayu, tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target cakupan vaksinasi COVID-19, diantaranya karena masih adanya keraguan masyarakat sasaran prioritas vaksinasi, terhadap vaksin yang disebabkan oleh berbagai informasi yang tidak lengkap/benar, terkait vaksinasi Covid-19.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan capaian target vaksinasi covid-19 diperlukan adanya penyegaran kembali komitmen lintas sektor, untuk percepatan pencapaian target, melalui berbagai upaya, diantaranya melalui optimalisasi dan komunikasi pelibatan masyarakat, pemanfaatan media edukasi, termasuk medial lokal dan tradisional.

"Ini kan sebagai tindak lanjut kegiatan ToT (Training of Trainer) dan Pengenalan CE Kits tingkat kabupaten," imbuhnya lagi.

Kegiatan ini terselenggara antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dengan JHCCP/BA for COVID-19 Jawa Timur. Dan nantinya bermanfaat bagi Multi Pihak untuk Kegiatan Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat Program BA for Covid 19 Puskesmas Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang.

"Yang jelas tujuan dari kegiatan orientasi CE Kits ini antara lain dapat memahami komunikasi pelibatan masyarakat untuk Alat Bantu KIE vaksinasi COVID-19," paparnya.

Selain itu, juga dapat memahami materi, media dan saluran kampaye untuk peningkatan vaksinasi COVID-19, mampu/terampil menggunakan media komunikasi (lembar balik & cue card) dengan metode partisciparoris dan bersedia menjadi relawan/kader untuk memberikan edukasi tentang vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat/komunitas masing-masing.

Dr. Bayu berharap, dari kegiatan tersebut, dapat memahami dan terampil dalam menggunakan CE Kits dalam memberikan edukasi vaksinasi kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran lansia.

"Setiap Kader/Penyuluh/Pendamping Masyarakat, membuat rencana edukasi vaksinasi COVID-19 kepada sejumlah kelompok sasaran," ungkapnya.

Lebih jauh dr. Bayu mengatakan, kalau Kader/Penyuluh/Pendamping/Relawan harus mempunyai komitmen untuk membawa Target Sasaran ke lokasi kegiatan Masyarakat untuk di vaksin.

Dari pantauan awak media, peserta orientasi penggunaan CE Kits ini dari berbagai unsur PKB/PLKB, Penyuluh/Pendamping Sosial, mereka adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, Kader). (tik)

Setelah Vacum Selama 2 Tahun Patrol Music Festival Kembali Digelar

Bupati Lumajang Thoriqul Haq ditemani wakil Bupati Lumajang serta Kepala Desa Purwosono saat menghadiri pagelaran Patrol Music Festival 2022

Lumajang, SMN - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq membuka Patrol Music Festival 2022 di Pemandian Alam Selokambang, Kamis (14/04/2022). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyemarakkan bulan Ramadhan 1443 H, setelah hampir selama pandemi festival serupa tidak bisa dilaksanakan.

Melihat ueforia masyarakat yang hadir, bupati mengaku senang, karena kembali merasakan nuansa Ramadhan yang telah lama dirindukan. "Masha Allah senenge rek," ujar bupati.

Setelah sempat vacum dalam 2 tahun terakhir, kini Patrol Music Festival kembali digelar selama 2 hari mulai 14-15 April 2022 yang diselenggarakan di pemandian alam Selokambang.

Namun begitu, meskipun beberapa kegiatan telah mulai bisa digelar kembali, bupati tetap menghimbau masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kegiatan-kegiatan sekarang sudah mulai dibolehkan, namun saya himbau tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker," harapnya.

Alunan berbagai alat musik pun memeriahkan acara tersebut ditambah bunyi irama musik diiringi sholawat semakin memeriahkan semarak bulan Ramadhan 2022 ini. Nampak para peserta cukup semangat dalam memperlihatkan penampilan terbaiknya.

Bekerja sama dengan Pemerintah Desa Purwosono, acara ini melibatkan Purwosono Music Community sebagai panitia penyelenggara.

Festival kali ini diikuti oleh 16 grup patrol yang akan tampil dan akan dipilih 4 tim terbaik.

"Empat penampil terbaik, akan mendapatkan uang pembinaan, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi semangat kita semua khususnya di bidang ekonomi kreatif," ujar Kepala Desa Purwosono Hendrik Dwi Martono," tutupnya.(tik)

Gubernur Kaltara Tuntut KONI Segera Lahirkan Bibit Atlet

Gubernur Zainal Arifin Paliwang saat menyerahkan bantuan perangkat olahraga sepakbola kepada pengurus Koni Kabupaten Malinau, yang diterima langsung oleh Ketua KONI Malinau, Tomi Labo

Malinau, SMN – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kota dituntut segera mencari dan melahirkan bibit atlet yang dapat diikutsertakan pada PON tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara.

"Segera mencari bibit atlet yang bisa dipersiapkan pada PON mendatang," Ungkap Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Jumat (14/4/2022).

Mengingat juga, lanjut Gubernur, pada PON yang di selenggarakan tahun lalu prestasi olahraga untuk di Kalimantan Utara menurun. "Bahkan yang sebelumnya kaltara peringkat 27. Pada PON tahun lalu berada di peringkat 32 dari 34 Provinsi," jelasnya.

Untuk itu, Gubernur menekankan kepada pengurus KONi baik tingkat kabupaten kota dan Provinsi agar segera melakukan pembinaan terhadap setiap bidang olahraga yang dipertandingkan. "Jadi sejak sekarang mencari olahragawan agar dilatih, dibina dan dijadikan atlet profesional yang bisa bertanding di PON," ungkapnya.

Tentunya, sambung Gubernur, para atlet dari setiap cabang olahraga yang dipertandingkan harus melewati tahapan-tahapan.

"Sebelum menuju ke PON. Pastinya di seleksi mulai tingkat kabupaten Provinsi dan seleksi pra pon. Nah berpotensi tentu bisa lolos dan diikutkan," tuturnya.

Gubernur menilai di kabupaten kota di Kaltara masih banyak sekali potensi atlet olahragawan jika benar benar diberikan pendampingan, pembinaan dan selalu dijaga. "Kita tahu bahwa di Kaltara ini banyak sekali potensi atlet. Hanya saja memang belum bisa merawat dan menjaga yang akhirnya para atlet kita lari ke daerah lain," jelasnya.

Karena itu, Gubernur mengatakan pemerintah provinsi bersama dengan KONi Kaltara ke depan akan memberikan sumbangsih dengan memberikan penghargaan bagi para atlet yang bepresitasi dan memberikan jaminan masa depan arah masa tuanya.

"Dengan begitu, para atlet yang lakukan pembinaan ini terus berada di Kaltara," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal juga menyerahkan bantuan perangkat olahraga sepakbola kepada pengurus Koni Kabupaten Malinau, yang diterima langsung oleh Ketua KONI Malinau Dr. Tomi Labo, M.Si.

"Saya harapkan bantuan bola futsal, sepakbola dan voli ini bisa memberikan semangat bagi cabor yang dibawah naungan koni malinau untuk berprestasi," Ungkapnya.

Ketua KONI Malinau Dr. Tomi Labo, M.Si, menyampaikan rasa syukurnya dengan diberikan bantuan perangkat olahraga ini.

"Apa yang disampaikan pak Gubernur. Tentu kami akan tindaklanjuti dan akan diserahkan ke cabor nantinya," tuntasnya. (syah)

Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Berkunjung ke BNNK Lumajang

Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang saat berkunjung ke BNNK Lumajang

Lumajang, SMN - Beberapa waktu lalu, Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang berkunjung ke BNNK Lumajang. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengatasi segala keterbatasan, khususnya terobosan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang utama, yaitu sarana dan prasarana.

Ketua Komisi D, Supratman menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi atas terobosan yang telah dilakukan BNNK Lumajang, atas maraknya peredaran gelap Narkoba.

Komisi D juga menyampaikan keprihatinan tentang peredaran gelap Narkoba yang sampai ke desa-desa.

"Kami sangat prihatin, karena peredaran narkoba sudah sampai menimbulkan korban usia anak-anak, dimana beberapa diantaranya mengalami kerusakan saraf, sehingga seperti mengalami gangguan jiwa, dan proses penanganan menjadi sangat sulit," papar Supratman.

Komisi D juga menyampaikan bahwa Peraturan Daerah tentang fasilitasi penanggulangan bahaya Narkoba sudah diagendakan. Komisi D berencana akan mengundang BNNK Lumajang, untuk rapat lebih lanjut berkaitan dengan beberapa agenda penting.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, seluruh Anggota DPRD yang mengadakan Kunjungan Kerja ke Kantor BNNK Lumajang, mengajukan permohonan tes urine sukarela secara spontan.

"Tes urine mendadak dilakukan sekitar pukul 11.30 WIB, dengan hasil seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja ke Kantor BNNK Lumajang dinyatakan Negatif Narkoba," terang Supratman.

Komisi D memahami, bahwa penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba memang harus dilakukan secara bersama-sama seluruh stake holders yang ada di Lumajang, tidak bisa hanya dengan mengandalkan BNNK dan Polres Lumajang saja.

Disisi lain, Kepala BNNK Lumajang AKBP Indra Brahmana, menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BNN, wilayah kerja BNNK Lumajang serta tentang strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba yakni *Supply Reduction* melalui kegiatan pemberantasan dan penegakan hukum yang dilakukan bersama Polres Lumajang dan BNNP Jawa Timur, serta *Demand Reduction* melalui kegiatan pencegahan, bekerjasama dengan instansi terkait, OPD dan instansi vertikal terkait, dalam hal ini Kementerian Agama.

Kepala BNNK Lumajang juga menjelaskan kondisi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba periode 2019-2022 di wilayah Kabupaten Lumajang.

AKBP Indra Brahmana mengatakan, bahwa BNN hanya memiliki kewenangan penegakan hukum yang masuk kategori Narkotika, sedangkan untuk yang kategori Bahan Adiktif dan obat obatan masuk ranah UU Kesehatan yang menjadi kewenangan Polri.

"Namun, BNNK tetap memberikan layanan rehabilitasi bagi para klien, termasuk penyalahgunaan obat-obatan bukan Narkotika, dan untuk upaya pemberantasan, sinergitas dengan Polres Lumajang yang sudah terjalin sangat baik sejak dulu tetap berjalan sampai sekarang, khususnya untuk suplai informasi intelijen, berkaitan jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika maupun obat-obat berbahaya," ungkap Indra.

Hadir dalan acara tersebut, H. Akhmat, Wakil Ketua DPRD Lumajang. Supratman, Ketua Komisi D. Umi Kulsum, Wakil Ketua Komisi D. Sugianto, Idris Marzuki. Karnadi. Andriyo, dan Mustainul Umam. (tik)

Pulau Maratua Jadi Percontohan Kawasan Wisata Ramah Lingkungan

PLN UIW Kaltimra bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Berau, Bank Kaltimtara, Berau Coal, PLN Group, juga hotel dan resort menyerahkan 600 unit kompor induksi untuk warga Pulau Maratua

Tanjung Redeb, SMN – PT PLN (Persero) meluncurkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi bertajuk 'Nyaman Kompor Induksi' untuk mewujudkan kawasan wisata yang ramah lingkungan. Pulau Maratua, salah satu pulau terluar di Kalimantan Timur yang tersohor dengan pesona wisata baharinya, terpilih sebagai lokasi pilot project atau percontohan pelaksanaan program ini.

Melalui program 'Nyaman Kompor Induksi', PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) menyerahkan 600 unit kompor induksi untuk warga Pulau Maratua, Selasa (12/4). Untuk menyukseskan program ini, PLN UIW Kaltimra bersinergi bersama pemerintah kabupaten Berau, Bank Kaltimtara, Berau Coal, PLN Group, juga hotel dan resort di Pulau Maratua.

General Manager PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto menegaskan, upaya ini merupakan salah satu strategi PLN dalam mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia. Menurutnya, konversi ke kompor induksi bisa menjadi awal yang baik untuk kemandirian energi, karena akan mengurangi ketergantungan pada impor LPG, dan beralih pada pemanfaatan listrik yang bersumber energi domestik.

"Terlebih, PLN memiliki roadmap pada 2024 untuk memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pembangkit di Maratua," kata Saleh, dikutip dari siaran pers PT PLN (Persero), Jumat (15/4).

Menurut Saleh, hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengubah energi fosil ke energi hijau. Program 'Nyaman Kompor Induksi' diharapkan mampu mendorong pemanfaatan energi listrik, terutama kompor induksi, oleh para pelaku industri pariwisata dan masyarakat seiring visi Maratua untuk menjadi green island.

"Dan ini juga merupakan langkah yang ditempuh untuk mendorong gerakan zero emisi di Indonesia, sekaligus merupakan bentuk partisipasi kami dalam mendukung KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia," ujar Saleh.

Program ini juga selaras dengan kampanye PLN terkait program electrifying lifestyle, yakni mengenalkan gaya hidup dengan memanfaatkan energi listrik seluas-luasnya. Sehingga tugas PLN adalah terus mendorong pemanfaatan energi listrik, khususnya melalui konversi ke kompor induksi, maupun memasifkan penggunaan motor dan mobil yang berbahan bakar listrik.

"Energi listrik saat ini melimpah dan siap untuk dimanfaatkan sebagai gaya hidup baru, baik kompor, sepeda, motor maupun mobil yang berbahan bakar listrik," lanjut Saleh.

Di sisi lain, salah satu warga Maratua, Sri Astuti mengapresiasi bantuan kompor induksi yang telah diterima melalui program 'Nyaman Kompor Induksi'. Melihat kondisi di Maratua yang sering mengalami kelangkaan gas LPG, keberadaan kompor induksi bisa menjadi salah satu solusi.

"Saya juga suka memasak dengan kompor induksi karena lebih bersih dan nyaman," kata Sri.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih yang turut hadir pada acara hari itu mendukung langkah baik yang dilakukan oleh PLN. Menurutnya, program ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lainnya di Kabupaten Berau.

"Kami sangat mendukung upaya transisi ini. Meskipun saat ini jumlah pengguna kompor induksi di Berau masih sedikit, dengan pilot project saya optimis bahwa konversi bisa dilakukan secara lebih masif, dan ke depannya bisa diterapkan di daerah-daerah lain," kata Juniarsih. (syah)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Sat Samapta Polres Kendal Gelar Sterilisasi dan Pengamanan Gereja

Sat Samapta Polres Kendal saat menggelar pengamanan dan sterilisasi dalam rangka hari kenaikan Isa Al-Masih di beberapa Gereja di wilayah Kendal

Kendal, SMN - Sat Samapta Polres Kendal menggelar pengamanan dan sterilisasi dalam rangka hari kenaikan Isa Al-Masih di beberapa gereja di wilayah Kendal yang dipimpin langsung Kasat Samapta Polres Kendal AKP Mustakim, Jumat (15/4/2022).

Disampaikan Kasat Samapta Polres Kendal AKP Mustakim bahwa guna memberikan ketenangan saat beribadah hari kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani di masa Pandemi ini pihaknya menerjunkan anggotanya untuk melaksanakan pengamanan dan sterilisasi pada 4 lokasi gereja di Kendal.

"Ada empat lokasi gereja yang menjadi atensi dalam pengamanan hari Kenaikan Isa Al-Masih diantaranya, Gereja St Antonius Padua Kendal, Gereja Santo Martinus Weleri, Gereja Isa Al-Masih Weleri dan Gereja GKJTU Jamaat Kendal," ujarnya.

Lebih lanjut AKP Mustakim menambahkan, bahwa dalam giat pengamanan tersebut, anggotanya dibekali dengan senjata laras panjang , anjing Pelacak K-9 dan alat deteksi bom (Mirror) sebagai langkah preventif antisipasi adanya serangan terorisme. "Dan alhamdulillah sampai saat ini khususnya wilayah Kendal situasi tetap kondusif," imbuhnya.

Di tempat terpisah Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto SH SIK MH menegaskan untuk semua Polsek Jajaran agar memberikan himbauan Protokol Kesehatan kepada Jemaat Gereja. "Kepada seluruh Polsek Jajaran agar menghimbau kepada para Jamaat dalam pelaksanaan ibadah tetap mematuhi Protokol Kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan," tegas AKBP Yuniar Ariefianto.

Kapolres Kendal menerangkan bahwa pengamanan perayaan kenaikan Isa Almasih di gereja – gereja yang ada di wilayah Kabupaten Kendal dilaksanakan dengan mengerahkan seluruh personil Polsek jajaran dibantu dengan anggota TNI dan masyarakat sehingga nantinya pelaksanaan peribadatan dan perayaan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Kapolres Kendal juga berharap, dengan kehadiran Polri di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman. "Khususnya kepada Jemaat Gereja yang sedang melaksanakan ibadah Kenaikan Isa Almasih," pungkasnya. (sur)

Kapolres Kendal Pimpin Sertijab Kasatpolairud Polres Kendal

Kapolres Kendal AKBP. Yuniar Ariefianto S.H., S.I.K., M.H., saat memimpin upacara Sertijab Kasatpolairud Polres Kendal

Kendal, SMN - Rotasi jabatan dalam Institusi Polri untuk penyegaran adalah hal yang sudah biasa. Berdasarkan Keputusan Kapolda Jateng : Kep/625/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalan jabatan dilingkungan Polda Jateng. Polres Kendal laksanakan Upacara Serah terima jabatan Kasatpolairud Polres Kendal di ruang kerja Kapolres Kendal pada Hari Senin, (11/4/2022).

Dipimpin Kapolres Kendal AKBP. Yuniar Ariefianto S.H., S.I.K., M.H., selaku Irup Upacara Sertijab tersebut juga dihadiri oleh Wakapolres Kendal, Pju Polres Kendal, Perwakilan Anggota Polairud Polres Kendal.

Adapun Jabatan Kasatpolairud Polres Kendal kini diemban oleh IPTU Agus Suwandi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Kaliwungu Polres Kendal.

Dalam kegiatan tersebut Kapolres Kendal menyampaikan dengan adanya rotasi jabatan ini, maka di jajaran Polres Kendal diharapkan jangan sampai terjebak pada rutinitas, dengan adanya pejabat baru justru dapat lebih meningkatkan kinerja Polres Kendal.

Kapolres Kendal berpesan kepada Pak Agus telah menjabat Kasatpolairud Polres Kendal bertanggung jawab sepenuh nya untuk mengatur strategi dan mengatur anggota untuk melaksanakan tugas kedepannya untuk menjadi lebih baik," pesannya. (sur)

Sembunyi di Sebuah Gubug, Pelaku Pembacokan Berhasil Ditangkap Unit Reskrim Polsek Boja

Unit Reskrim Polsek Boja saat berhasil menangkap Pelaku Pembacokan

Kendal, SMN - Dua orang pemuda warga Boja, Kendal menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di depan sebuah warung yang terletak di halaman Exs Kantor Kawedanan Boja, Selasa (12 April 2022).

Kronologi kejadian, Minggu 27 Maret 2022 jam 03.00 Wib dini hari dua korban yakni AS (19) dan DYP (18) berboncengan sepeda motor masuk ke halaman Kantor Exs Kawedanan Boja untuk membeli rokok di sebuah warung.

Saat melewati jalan masuk, korban berpapasan dengan pengendara berboncengan tiga dan nyaris serempetan, salah seorang dari mereka dengan nada tinggi mengumpat kearah korban namun korban tidak menghiraukan.

Sekitar radius sekira 40 meter kedua korban berhenti di depan sebuah warung dan berjalan menuju ke warung, saat kedua korban berjalan beriringan menuju warung tersebut korban didatangi seorang laki-laki tak dikenal terlihat mengambil sebilah clurit dari balik jaketnya, dan langsung menyabetkan clurit kearah kepala korban DYP.

Mendapat serangan mendadak spontan DYP menangkis celurit menggunakan tangan dan lari masuk kedalam warung, tidak cukup sampai disitu korban AS yang berada di sebelah pelaku juga menjadi sasaran senjata tajam yang dipegang pelaku, empat kali bacokan mengenai tubuh AS hingga AS jatuh terkapar di tanah. Melihat korbanya tak berdaya kemudian pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Akibat peristiwa tersebut korban DYP mengalami luka sayat pada tangan kanan, sedangkan AS mengalami luka sayat/robek pada kepala atas, punggung dan kedua tanganya, beberapa warga yang saat itu berada di TKP tidak mampu berbuat banyak karena takut menjadi sasaran pelaku, oleh warga korban dibawa ke puskesmas untuk menjalani perawatan.

Kapolsek Boja AKP Agus Wibowo, S.H. membenarkan peristiwa tersebut "Meski saksi di TKP tidak ada yang mengenal pelaku dan diantara saksi tidak begitu detail mengenali ciri ciri pelaku. Namun saya perintahkan anggota untuk segera mengungkap kejadian keji tersebut," tuturnya.

Berbekal informasi yang minim apalagi situasinya dini hari dan keadaan TKP gelap tidak menjadikan Unit Reskrim Polsek Boja surut, melalui kejelian dan ketelatenan mengumpulkan informasi, usaha tersebut membuahkan hasil dan pelaku berhasil ditangkap seminggu setelah kejadian.

Kanit Reskrim Polsek Boja Aiptu Mahzum Syafi'i, S.H. membenarkan penangkapan pelaku pembacokan tersebut "Ya benar, pelaku sudah dapat kami tangkap di tempat persembunyiannya di sebuah bedeng/gubug jauh dari perkampungan di daerah Jatibarang, Mijen, Semarang, berkat kerjasama anggota dan masyarakat pelaku dapat kami tangkap, Saat ini masih dalam proses penyidikan, kondisi korban sudah mulai membaik mudah mudahan perkara segera dapat kami limpahkan ke kejaksaan," pungkasnya. (sur)

Kunjungi Pasar Ramadan, Wagub Taj Yasin : Layak Dikembangkan Jadi Desa Wisata

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen saat mengunjungi pasar Ramadan di dukuh Sekararum Desa Sekarsari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Rabu sore (13/4/2022)

Rembang, SMN - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen berkunjung ke pasar Ramadan di dukuh Sekararum Desa Sekarsari Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Rabu sore (13/4/2022). Apresiasi diberikannya atas inisiasi pemuda yang tergabung dalam SKRM Squad yang telah bergerak untuk membuat kemandirian desa.

Wagub Taj Yasin mengatakan pasar tersebut merupakan bentuk pendampingan kepada warga yang patut dicontoh, tidak hanya memberikan stimulan.

"Ini upaya membuat warga memiliki etos kerja. Menciptakan suatu kawasan perdagangan, sehingga mereka bisa berjualan bersama disini," ujarnya.

Putra KH Maimoen Zubair itu juga menuturkan Pasar Ramadan Sekararum ini menjadi tempat ngabuburit yang asyik bagi warga. Jika dikelola lebih serius, pasar yang diberikan sedikit sentuhan ornamen zaman dulu, seperti daun jendela, lumpang kayu, meja dan kursi lawas bisa menjadi destinasi wisata.

Desa Sekarsari ini merupakan salah satu desa yang didampingi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di mana Pemprov Jateng memiliki program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi satu desa kategori miskin.

"Biro APJB (Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa) yang mendampingi disini. Tadi juga ada dampingan dari komunite ekonomi kreatif jawa Tengah," imbuhnya.

Ahdiat Galih salah satu pelopor Pasar Ramadan Sekararum menuturkan pasar yang buka selama bulan Ramadan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga. Terlebih masih di masa pandemi dan kebutuhan selama bulan Ramadan tentu warga membutuhkan tambahan pemasukan rumah tangga.

"Pasar ini juga untuk menjawab imajinasi (keinginan,red) warga ada pasar di desa Sekarsari. Akhirnya pemuda bergerak membuat pasar yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan," terangnya.

Ditambahkan Galih berbagai makanan dan minuman dijual oleh warga sekitar di pasar tersebut. Ada sekitar 20 stand atau lapak yang siap melayani pengunjung.

Ia menyebut perputaran uang di pasar Ramadan Sekararum ini mencapai Rp 5 juta per hari, diperkirakan dalam satu bulan dapat menyentuh Rp 120 juta lebih.

Di hari-hari tertentu juga dimeriahkan berbagai hiburan. Seperti pentas musik, hadroh dan penampilan seni lainnya. (or)

Razia, Satpol PP Amankan Pasangan Tak Resmi

Rembang, SMN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang terus mengintensifkan razia penyakit masyarakat saat bulan suci Ramadan.

Razia Penegakan Perda No 2 Tahun 2019 tentang ketertiban umum menyasar hotel dan penginapan.

Saat razia pada Jumat (8/4/2922) siang, Satpol PP mengamankan tiga pasangan tak resmi yang kedapatan asyik berduaan di kamar hotel.

Kepala Satpol PP Rembang, Sulistyono mengatakan, satu pasangan terjaring dari salah satu hotel di Kecamatan Sluke dan dua pasangan lainnya diamankan dari hotel di Kecamatan Lasem.

Mereka yang terjaring razia digelandang ke Mako Satpol PP Rembang untuk dilakukan pembinaan.

"Kita lakukan pembinaan. Sanksi sesuai peraturan yang berlaku," terangnya.

Untuk menciptakan suasana kondusif selama Ramadan, sebelumnya Pemkab Rembang juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan operasional kafe dan karaoke secara penuh selama bulan suci Ramadan.

Penutupan kafe karaoke selama Ramadan bertujuan untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. (or)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang saat melakukan razia di salah satu hotel/penginapan

Tambang Pasir di Sarang Rembang Longsor, Satu Orang Tewas

Tempat terjadinya longsor di Sarang Rembang beberapa waktu lalu

Rembang, SMN - Masripah, 44, penjual jajanan keliling warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Sarang, akhirnya meregang nyawa setelah terjatuh dan tertimbun longsor galian pasir kuarsa di desanya, Sabtu (9/4) sore. Tak hanya Masripah, musibah itu juga menyebabkan Sa'adah, 29 warga Desa Baturno, Kecamatan Sarang, mengalami patah tulang.

Sumber dari awak media menyebutkan petaka bermula ketika emak-emak itu mengendarai sepeda motor beriringan melintasi jalan tambang di desanya. Tanpa mereka sadari tiba-tiba jalan tambang itu longsor dan keduanya ikut terperosok bersama sepeda motor yang mereka tumpangi. Kedua korban pun sempat terkubur tanah sedalam dua meter.

Sejumlah warga sempat kesulitan melakukan penyelamatan. Sehingga, meminta operator alat berat tambang galian C untuk mengevakuasi. Tubuh keduanya berhasil dievakuasi sekitar satu jam. Warga kemudian membawa kedua korban ke Puskesmas Sarang.

Namun, karena kondisi kritis. Korban pun kemudian dilarikan ke rumah sakit di Rembang. Sayang, nyawa Masripah tak bisa diselamatkan. "Jenazah Masripah sampai di Tawangrejo sekitar 21.00 WIB.

Sementara Sa'adah, (29) mengalami patah tulang dan masih rawat di salah satu rumah sakit swasta di Rembang. "Banyak tulang yang patah. Mungkin karena tertimbun tanah dan motornya," imbuhnya.

Awak media menambahkan jika ketinggian longsor galian lebih dari sepuluh meter. Kondisi tersebut menyebabkan keduanya sempat terkubur. Sehingga, untuk evakuasi membutuhkan alat berat." Kebetulan saat kejadian bego penambang masih beroperasi sehingga korban cepat dievakuasi," ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Sarang AKP Pujiono menyebutkan, insiden itu merupakan kecelakaan tunggal dengan korban Masripah, 44 dan Sa'adah, 29. "Untuk Masripah meninggal saat di bawa ke rumah sakit dan Sa'adah patah tulang masih di rawat," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (10/4).

Pihak kepolisian hingga kemarin masih melakukan pemeriksaan dan menghimpun keterangan para saksi atas insiden memilukan tersebut. (or)

Kunker Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Ke 3 Perusahaan di Cicurug

Sukabumi, SMN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi lakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke tiga perusahaan di Cicurug untuk memastikan kesiapan Tunjangan Hari Raya (THR) dan UMK tahun 2022.

Informasi yang dihimpun Suara Media Nasional ialah, Kunker Anggota DPRD tersebut ke tiga Perusahaan yaitu PT. Amerta Indah Otsuka, PT. Manito serta PT. KG Fashion Indonesia yang berada di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (14/4/2022).

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi saat melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke tiga perusahaan di Cicurug

lakukan kunker di PT. KG Fashion Indonesia, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar mengatakan, kunker yang dilakukan komisi IV hari ini ke beberapa perusahaan sebagai sampel atau contoh dimulai dari yang padat hingga sedikit karyawannya.

"Supaya kita bisa memberi antisipasi kepada pemerintah, agar melakukan langkah kalau seandainya perusahaan yang tidak siap," Ujar Hera.

"Alhamdulillah hampir semua perusahaan yang sudah kami datangi dan menyatakan sanggup membayar untu kembayar THR," Imbuhnya.

Menurutnya selain THR, hal lain yang dipastikan dalam kunker kali ini adalah pembayaran upah (UMK) yang skala penerapan strukrurnya naik 1-4 persen merujuk pada surat edaran yang ditandatangani Bupati Sukabumi Marwan Hamami, tentang penerapan struktur skala upah akibat tidak dimungkinkannya kenaikan UMK tahun 2022.

Lebih lanjut Hera, Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sukabumi itu harus diamankan (dijaga) demi kesejahteraan karyawan juga wibawa pemerintah.

"Ada yang sudah sampai 5%, kami juga menemukan perusahaan yang tidak sesuai (kenaikan), kami himbau secara lisan, lebih kepada persuasif saja dulu alhamdulillah, mereka memperbaiki," ujar Hera.

Pihaknya juga mengingatkan kepada para petinggi di perusahaan agar terus memperhatikannya, mereka menunggu THR mohon dengan apapun alasannya harus diberikan, karena itu merupakan hak setiap karyawan," pungkasnya Hera.

Sementara HRD Manager PT.KG Fashion Indonesia Aang Sukandar menyampaikan, Menindaklanjuti kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, pada hari ini, Kamis (14/4/2022) ke beberapa perusahaan salah satunya PT. KG Fashion Indonesia.

"Kami dari perusahaan menghargai kewenangan dan tugas mereka untuk mememonitor terutama dalam hal ini Implementasi dengan sistem kenaikan umk," jelas Aang.

Menurutnya, kenaikan struktur upah (UMK) tahun ini rancu sebab beberapa kali terbi SE dan SK. Hal itu nyatanya menimbulkan beberapa polemik di perusahaan, "Saya berharap untuk tahun ke depan pemerintah tidak lagi mengeluarkan SE tapi harus SK agar tidak terjadi polemik di perusahaan," tegas Aang.

Dikatakan Aang, Terkait THR PT. KG Fashion Indonesia menyatakan sudah siap membayar THR pada kurang lebih 2.000 karyawan

"Kita akan memberikan THR sesuai dengan ketentuan, akan diberikan tgl 23 (H-9 lebaran), kita berikan lebih awal yang seharusnya H-7," Tandasnya. (rob)

BC Batam Amankan Tiga Penumpang dan 811,3 Gram Sabu yang Disembunyikan Dalam Dubur

Tiga orang penumpang yang diamankan Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim lantaran membawa Sabu disembunyikan di dalam Duburnya

Batam, SMN - Tiga orang penumpang diamankan petugas Bea dan Cukai (BC) Batam lantaran membawa narkotika jenis sabu/methamphetamine sebanyak 811,3 gram Kamis (7/4/2022) di Bandara Hang Nadim Batam.

Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Undani melalui WhatsAppnya, Kamis (7/4/2022) mengatakan ketiga penumpang itu yaitu berinisial BA (22), ZA (25), dan Z (25).

Modus yang mereka gunakan, barang haram itu mereka bungkus di dalam plastic hitam kemudian dimasukkan ke dalam dubur mereka dan satu orang pelaku memasukkan 4 bungkus.

"Barang haram itu dibungkus di dalam plastic, jumlah seluruhnya ada 12 bungkus setiap orang memasukkan 4 bungkus berisi sabu ke dalam duburnya," katanya.

Lebih lanjut Undani menjelaskan kronologi kejadian, berdasarkan pengembangan dari penindakan narkotika, petugas Bea dan Cukai Batam melakukan pencarian penumpang yang menjadi terduga membawa barang terlarang tersebut.

Setelah ditemukan, petugas Bea dan Cukai Batam melakukan tes urine, dan mereka bertiga positif menggunakan methamphetamine dan amphetamine. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan body checking dan mengecek dubur tersangka.

"Tersangka dibawa ke Rumah Sakit (RS) Awal Bros untuk dilakukan pemeriksaan rontgen. Hasilnya didapati masing-masing 4 (empat) bungkus plastik barang bukti dari masing-masing tersangka, yang disembunyikan di dalam badan tersangka," pungkas Undani.

Bungkusan plastik yang dibawa oleh tersangka tersebut masing-masing dibuka untuk diambil sampel dan diuji menggunakan narcotest untuk memastikan isi dari plastik tersebut. Dari hasil narcotest diketahui bahwa isi bungkusan plastik tersebut positif mengandung narkotika berupa sabu/methamphetamine.

Ia menyebut total barang bukti itu sebanyak dua belas bungkus plastik berisi methamphetamine dengan berat total 811,3 gram.

"Atas barang bukti tersebut dilakukan penegahan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan nomor SBP-N-03, SBP-N-04, dan SBP-N-05 tanggal 7 April 2022," katanya.

Setelah barang haram tersebut ditemukan, petugas Bea dan Cukai batam selanjutnya membawa ketiga tersangka dan barang bukti ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti dan tersangka diserahterimakan ke Polda Kepri dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk proses lebih lanjut. (ph)

Tanggapan Walikota Batam Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Batam

Batam, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Mengadakan Rapat Paripurna ke II Masa Persidangan II Tahun 2022 Dengan Agenda Tanggapan Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus Pembentukan Pansus di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam ,Batam Center ,Batam Rabu (13/4/2022).

Rapat Paripuna tersebut di buka sekaligus dipimpin oleh wakil ketua III Ahmad Surya dan diharidiri oleh Anggota Dewan baik secara fisik dan yang telah menandatangi daftar hadir sebanyak 29 Orang dan yang tidak dapat hadir 21 orang.

"Untuk menghemat waktu kami persilakan kepada wakil wali kota batam meyampaikan tanggapan Wali Kota Batam Atas Pandangan Umum fraksi DPRD tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Ahmad Surya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam atas Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal itu disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam. Pemko Batam memberikan jawaban atas pandangan sembilan Fraksi DPRD Kota Batam.

Sebelum tangapan ini kami lanjutkan pada kesempatan ini pemerintah kota batam mengucapkan terimah kasih dan Apresiasi atas Pandangan umum yang telah disampaikan dan telah menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dibahas sesuai tata tertib DPRD Kota Batam.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan tanggapan dan /atau jawaban atas pandangan umum Fraksi terhandap Ranperda tentang Peb=ngelolahan Keuangan daerah, Sebagai Berikut:

1.Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Menggapi pandangan Umum yang disampaikan oleh anggota Dewan terhormat bapak Thomas Arita Sembiring ,S.Sos ,dapat kami jelaskan bahwa pemerinah kota batam sepakat bperlunya penyesuaian terhadap Peratuaran Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, baik dari aspek perencanaan,Penganggaran,Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan, agar Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib, efisien ekonomis, efektif, trasparan dan bertanggungjawab.

Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan yanfg disampaikan oleh anggota Bapak RTaufik Muntasir, dari Fraksi Partai Nasional Demokrat,Bapak Capt. Jansen Luther Jansen Mar. MM. dari Fraksi Gerakan Indonedia Raya, Bapak Biyanto dari Fraksi PPPrtai Amanat Nasional, Bapak Donminggus Roslinus Rega Woge dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Bapak H. Sumali ,S.E, dari Fraksi Partai demokrat _ PSI.

2.Fraksi Partai Nasional Demokrat, Menanggapi Pandangan umum yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan yang terhormat Bapak Taufik Muntasir, dapat kami jelaskan bahwa sesuai amanat PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menyiapkan Regulasi Tentang perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan Peratuaran perundangan yang lebih tinggi agar ada kepastian Hukum dan terciptana Tata Kelola Keuangan Daerah secara tertib, efisien,ekonomis efektif,transparan dan bertanggungjawab sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kota batam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.Fraksi Golongan Karya, Menangapi pandangan umum yang disamapaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Ibu Nina Mellanie B.Bus., M.M dapat disampaikan sebagai berikut:

1.Pemko Batam sepakat bahwa Perda pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan harmonisasi dan dieselarasan dengan PP yang lebih tinggi, sehingga Peratuan pengelolaan Keuangan Daerah tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (Overlaving), dengan Peraturan lainnya, jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormay Bapak Rohaizat, S.T. M.M. Fraksi keadilan Sejahtera.

2.Berkaitan dengan tugas dabn fungsi pejabat Pengelolah keuangan daerah telah ditunagkan dalam Ranperda ini antara lain:

A. Pemegang kekuasaan pengelolah keuangan daerah, B. Koordinasi pengelolah keuangan daerah, C. Pejabat Pengelolah keuangan daerah, D. Pengguna Anggaran, E. Kuasa pengguna anggaran, F. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, G. Pejabat penatausahan keuangan satuan kerja perangkat daerah,dan, H. Bendahara penerimaan dan pengeluaran.

Begitu juga tentang tugas dan tanggungjawab DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan APBD, Pengawasan hingga Pertanggungjawaban.

3.Mengenai penyusunan APBD yang alokasi anggaran tidak sesuai dengan prioritas daerah, belanja modal yang tidak tepat sasaran,dan masih terdapat kecendrungan tidak tercapai kesepakkatan dalam KUA- PPAS, permasalahan ini tidak dituangkan dalam batang tubuh Ranperda pengelolaan keuangan daerah, sebaiknya hal ini didalami pada saat penyusunan APBD nantinya.

4.Fraksi Partai Gerindra, Menanggapi pandangan umum yang disapaikan oleh bapak anggota dewan yang terhormat Bapak Capt.Luther Jansen,Mar. MM. dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemko batam sepakat atas sasaran yang disampaikan agar meakukan kajian secara mendalam pada saat pembahasan Ranperda pengelolahaan keuangan daerah serta menyesuaikan kearifan lokal sebagai bentuk upaya Good Governance. 2. Mengenai alokasi anggaran berbnasis kinerja pada masin-masing SKPD,mengsingkronkan perencanaan dan penganggaran serta memprioritaskan anggaran aerah untuk pelaku UMKM skala kecil dan masyarakat terdampak covid-19 agar perekonomian batam semakin membaik,hal ini sebaiknya didalami pada saat penyusunan KUA/PPAS dan Penyususnan APBD.

5.Fraksi Partai Keadilan Kesejahtera, Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh anggta Dewan yang terhhhrmat Bapak Rohaizat,S.T., M.M.Dapat dijelaskansebagai berikut:

1.Pemko Batam sepakat perlunya Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang membuata kearifan lokal dan kebutuhan daerah sesuai Peratuan Perundang-undangan, 2.Terkait dengan batas penyusunan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Amanat PP No 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Perda pengelolaan daerah ditetapkan paling lama tahun 2022.

6.Fraksi Partai Amanat Nasional, Menanggapi Pandangan Umum yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat yang disampaiakn Bapak Biyanto, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Mengenai Materi Ranperda Pengelolahan Keuangan Daerah ini telah disusun dengan mempedomani UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Thn 2019, dan Permendagri No 77 Tahun 2020, 2.Disamping itu juga Memepedomani Peraturan Perundang-undangan lainya dengan mencantumkan Materi muatan lokal tentang penyusunan RKA dan penghapusan Piutang daerah, 3.Terkait up[aya pemerintah Kota Batam dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota batam sebaiknya dibahas dalam penyusunan APBD, sedangkan untuk mekani pemungutan pajak dan retribusi diatur dalam Perda Pajak dan retribusi.

7.Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Menganggapi Pandangan umum yang disampikan oleh bapak Tumbur Hutasoit, S.H, dapat disamaikan bahwa pemko batam menyambut baik dan apresiasi atas dukungan DPRD Kota Batam untuk melanjutkan pembahasan Ranperda inisesuai dengan ketentuan Peratuaran Perundfang-undangan dan Tata Tertib DPRD kota batam.

8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Menanggapi Pandangan umum yang disampaikan bapak Dominggus Roslinus Rega Woge dapat dijelskan sebagai berikut:

1. Pemko Batam Sepakat agar anggaran keuangan daerah digunakan untuk kebutuhan masnyatakat kota batam dan mendorong alokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi selain perbaikan infrastruktur. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama pada saat penyusunan APBD, 2. Pemko Batam sepakat bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan mendasar ,yaitu bencana ,krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan capaian penerimaan dan indikator pogram kegiatan tidak dapat terealisasi elama periode 5 (Lima) tahun namun terhadap perubahan RPJMD tidak termasuk dalam Ranperda pengelolaan keuangan daerah, 3. Terkait adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan daerah yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap memiayai pembangunan di kota batam yang salah satuanya dari Aspirasi masyarakat yang terjaring lewat kegiatan Reses anggota dewan yang dilaksanakan di daerah Konstituen yang dirumuskan dalam bentuk pokok- pokok pikiran DPRD, Hal ini akan menjadikan perhatian pemerintah kota batam dlam menyusun Prioritas Pembangunan di Kota Batam.

9. Fraksi Partai Demokrat-PSI, Menaggapi pandangan umum yang disampaikan oleh bapak H. Sumali, S.E, dapat dijelaskan bahwa pemegang kekuasan pengelolah keuangan daerah adalah kepala daerah. Kepala daerah melimpahkan sebagian kewenangannya berupa perencanaan, penggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan.dan pertanggungjawaban serta pengawsan keuangan daerah kepada pejabat poerangkat daerah yaitu Sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangn daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pengguna anggaran serta Inspektorat sebagai pengawas keuangan sesuai peratuaran Perundang-undangan.

Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Demikianlah tanggapan dan atau jawaban wali kota batam ini disampaikan. Namun disadari masih belum dapat menjawab seluruh pandangan umum fraksi karena terbatasnya kemampuan dalam memaknai dan memahami padangan umum fraksi yang disampaikan.Kiranya hal tersebut akan kami lengkapi padfa saat pembahasan secara tekins antara pansus DPRD kota batam dan Tim Pemko batam. (ph)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Di Hadapan Komisi X DPR RI, Gubernur Kaltara Perjuangankan Status GTK Honorer

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perihal evaluasi hasil Seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), Kamis (7/4/2022)

Kaltara, SMN – Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perihal evaluasi hasil Seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), Kamis (7/4/2022).

Di hadapan Panja Komisi X DPR RI, gubernur mengungkapkan agar tenaga GTK yang masih berstatus honorer mendapat prioritas untuk diangkat menjadi PPPK. Ia melihat, masih banyaknya tenaga GTK di Kaltara yang harus diperjuangkan menjadi PPPK.

"Tenaga GTK yang statusnya masih honor harus kita prioritaskan menjadi PPPK. Apalagi yang telah mengabdi cukup lama. Harus ada pertimbangan kemanusiaan, khususnya bagi mereka yang telah mengabdi di daerah terpencil dengan situasi alam yang dihadapi setiap hari,"jelas Gubernur.

Tidak hanya itu, Gubernur juga meminta kepada Panja Komisi X DPR RI agar mempertimbangkan usulan tunjangan kemahalan bagi seluruh tenaga GTK yang ada di Kaltara. Ini menjadi salah satu upaya agar guru sejahtera. Di Kaltara, kata Gubernur, Pemprov telah memberikan insentif tambahan bagi GTK honoer di SMA/SMK/SLB sebesar Rp 550 ribu per bulan.

"Karena keterbatasan anggaran, kita harapkan dari pemerintah pusat juga mempertimbangkan ini kembali. Sehingga kehadiran negara terhadap tenaga pendidik kita itu benar-benar dirasakan oleh merekan," tegas Gubernur.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan, jika seleksi guru PPPK pada tahun lalu berjalan tertib dan lancar. Namun ada sejumlah kendala seperti kendala geografis dan transportasi. Akan tetapi, hal itu dapat teratasi dengan digelarnya tambahan waktu/tes susulan.

"Peserta yang dari daerah perbatasan, seperti krayan mengalami kesulitan akses, dan tertunda akibat transportasi dan kondisi geografis wilayah Kalimantan utara,"katanya.

Kendala lainnya adalah, daerah yang sulit dijangkau kurang diminati oleh pendaftar, sehingga formasi PPPK tahun 2021 untuk sekolah tersebut belum terpenuhi.

Berkaitan dengan ketersediaan anggaran untuk gaji guru PPPK, Pemprov mengalokasikan sebesar Rp 8,4 miliar untuk tahun 2021. Ini tercantum berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI No. S-98/PK/2021. Sedangkan untuk tahun 2022 teralokasi sebesar Rp 18,2 miliar sesuai dengan SE DJPK No. S-204/PK/2021.

Pemprov, jelas Gubernur, juga telah mengusulkan sebanyak 464 formasi PPPK tahun 2022 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 800/1100/2.1-BKD tanggal 15 November 2021 perihal Penyampaian Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi. Rinciannya, 112 formasi PPPK Guru dan 352 formasi PPPK Non-Guru. (syah)

Bupati Karimun Sambangi Desa Lebuh pada Safari Ramadhan ke 11

Bupati Karimun diwakili para pejabat saat mengunjungi Masjid Assyuhada Desa Lebuh Kecamatan Belat dan menyerahkan dana bantuan untuk rumah ibadah

Karimun, SMN – Ramadan malam ke 11, rombongan Bupati Karimun diwakili para pejabat mengunjungi Masjid Assyuhada Desa Lebuh Kecamatan Belat, Selasa (12/4) malam.

Mengawali acara, Asisten III Pemda Karimun Junaidi memberikan bantuan kepada pengurus masjid Assyuhada. Ia menuturkan, Bupati Karimun Aunur Rafiq berhalangan hadir karena dipanggil rapat bersama Gubernur Kepri H Ansar Ahmad.

Wakilnya, Anwar diagendakan Safari Ramadhan di masjid lainnya. Serta Sekda Karimun sedang menunaikan ibadah haji. Junaidi mengatakan, patut disyukuri tahun ini diberikan kelonggaran dalam melaksanakan Safari Ramadhan 1443H/2002 M sehingga bisa menjalin tali silaturahmi.

"Selama dua tahun lalu, kita tidak dapat melaksanakan Safari Ramadhan dikarenakan kondisi Covid-19. Alhamdulillah tahun ini kita dapat melaksanakan namun kita tetap mematuhi prokes," ungkapnya.

Dalam isi tausiahnya, Junaidi mengajak para jamaah selalu berbuat baik. Kebiasaan itu tidak hanya di bulan suci Ramadhan tapi harus berlanjut di bulan-bulan lainnya. "Di Bulan Suci Ramadhan ini mari kita isi dengan hal kebaikan. Biasakan melatih diri kita agar selalu berbuat baik," ucap Junaidi.

Contohnya, berbuat baik selalu bersedekah. Ini melatih diri ikut serta bersimpati terhadap sesama. Rombongan Safari Ramadhan ke Desa Lebuh diikuti, Asisten 1 Pemkab Karimun Sularno, pimpinan OPD, Kabag pemda Karimun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga pimpinan organisasi pemuda Karimun. Selain itu, pihak Pemkab Karimun juga menyerahkan dana bantuan untuk rumah ibadah. (bl)

Pemkab Karimun dan Kementerian Sosial Menyerahkan Bantuan Korban Bencana

Pemkab Karimun melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia saat menyerahkan bantuan kepada korban bencana

Karimun, SMN – Pemkab Karimun melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyerahkan bantuan kepada korban bencana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Muhammad Tang mengatakan, jumlah bantuan untuk korban bencana yang diserahkan sebanyak di 42 titik se-Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Dari jumlah itu lanjutnya, bantuan yang sudah disalurkan ke 37 titik terjadinya bencana. "Masih ada 5 titik lagi bantuannya yang belum disalurkan ke penerimanya, yaitu Kecamatan Meral 2 titik dan Kecamatan Belat 3 titik," ujarnya, Sabtu (9/4/2022) sore.

Hal itu disampaikan Kadinsos usai menyerahkan bantuan ke korban kebakaran atas nama Hamidah, di pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Kebakaran yang menimpa Hamidah terjadi pada tahun 2021 lalu.

Penyerahan bantuan dalam agenda safari ramadhan 1443 H Pemkab Karimun (Tim 2) ke Masjid Miftahul Jannah, Kampung Dalam Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara.

M. Tang menjelaskan, bantuan yang diserahkan dari Pemkab Karimun berupa sembako yang sifatnya darurat untuk digunakan. "Sembako diantaranya berisikan beras, teh dan kacang hijau," ungkapnya.

Sedangkan bantuan dari Kementerian Sosial, berupa peralatan dapur, peralatan makan, selimut, kasus, tikar dan terpal. "Penerima bantuan paling banyak korban kebakaran, sisanya warga yang rumahnya tertimpa pohon," ucap M Tang.

Ditempat yang sama, didampingi Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial Dinsos Kabupaten Karimun, Wahyu Amirullah mengharapkan, semoga bantuan telah disalurkan bisa meringankan beban bagi yang tertimpa musibah. "Semoga bermanfaat dan membantu para korban bencana. Mari kita sama-sama berdoa tidak ada lagi terjadinya bencana alam/sosial di Kabupaten Karimun," pintanya. (bl)

Safari Ramadhan Wakil Bupati di Masjid Al Amin

Wakil Bupati (Wabup) Karimun Anwar Hasyim saat melakukan Safari Ramadhan di Masjid Al Amin Kampung Sukajaya

Karimun, SMN - Wakil Bupati (Wabup) Karimun Anwar Hasyim melakukan Safari Ramadhan di Masjid Al Amin Kampung Sukajaya, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selasa (12/04).

Saat ditemui sejumlah awak media, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan tujuan pertama dari Safari Ramadhan adalah untuk meningkatkan silaturahmi sedangkan untuk berkunjung satu persatu itu tidak mungkin, makanya pemerintah membuat program Safari Ramadhan dan di Safari Ramadhan inilah terjalin kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Safari dampaknya sangat besar karena di tengah masyarakat selain bertatapan muka langsung, tentu masyarakat bisa memberi masukan kepada pemerintah," ucap Wakil Bupati.

"Program safari Ramadhan sangat besar dampaknya dalam kebersamaan sebagai modal utama dalam membangun Karimun ke depannya," ujarnya.

Oleh sebab itu dirinya menghimbau kepada masyarakat atau jamaah untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kualitas beribadah dibulan suci Ramadhan agar terbangun keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun kabupaten Karimun. (bl)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Lantik Wan Darussalam Sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan DR Ir. Wan Darussalam M.Sc Sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto

Batam, SMN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, melantik DR. Ir. Wan Darussalam, M.Sc sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam pada Rabu (13/4/2022) bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pelantikan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penetapan serta Pengangkatan Anggota Bidang Pengusahaan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 11 April 2022.

Airlangga berpesan kepada Wan Darussalam sebagai Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, termasuk dalam mendukung pengembangan 2 KEK yaitu KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Teknik.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, bahwa BP Batam dengan formasi yang lengkap, diharapkan menjadi fasilitator dan faktor penarik untuk pengembangan investasi di Batam.

Dengan formasi ini diharapkan Batam dapat menangkap berbagai peluang baru dengan tetap mempertahankan peluang yang ada seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung, data center, pariwisata berbasis budaya, serta mempercepat pembangunan Infrastruktur Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar.

"Saya ingin BP Batam dapat meningkatkan perekonomian di Batam dan merealisasikan berbagai rencana atau minat investasi baru, guna menunjang perekonomian regional serta nasional," ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Kepala dan para Anggota Bidang juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program strategis pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam terutama dalam mengimplementasikan PP Nomor 41 Tahun 2021.

"Sejalan dengan dilantiknya Saudara Wan Darussalam pada hari ini, akan semakin melengkapi formasi Pimpinan BP Batam untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi BP Batam," ujar Rudi.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam saat ini membawahi 5 Badan Usaha dan 3 Direktorat yakni :

Badan Usaha Bandar Udara; Badan Usaha Pelabuhan; Badan Usaha Rumah Sakit; Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan; Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum; Direktorat Restrukturisasi; Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko; dan Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.

Sosok Wan Darussalam bukanlah orang asing di dunia birokrat dan telah berpengalaman kurang lebih 22 tahun, pria kelahiran Pekanbaru, 16 April 1962 merupakan lulusan International Institute For Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) – The Netherlands, 1991; International Institute For Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) - The Netherlands, 1993; Universitas Airlangga – Surabaya – 2005.

Dengan kompetensi dan pengalaman yang ia miliki, ia pernah menjabat berbagai jabatan strategis.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban Wan Darussalam : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam; Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 2019; Anggota Tim Kelompok Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Rempang, 2021; Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam; Ketua Tim Penyusun RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026; Ketua Tim Penyusun RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021; Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kota Batam; Wakil Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota Batam; Wakil Ketua Tim Pembina Kota Sehat Tahun 2019-2021 Kota Batam; Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam; Sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Batam; Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, 2018-2022; Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Batam, 2020-2022.

Dengan pelantikan ini, maka formasi pimpinan BP Batam menjadi lengkap dan solid. Formasi ini sekaligus menjadi kekuatan, sinergitas dan koordinasi manajerial yang semakin baik untuk pembangunan progresif dan perencanaan strategis Batam kedepan. (ph)

Naik Kelas, Pemkab OKI Raih Predikat B Evaluasi Sakip 2021

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil menggeber performa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari predikat CC pada tahun sebelumnya menjadi B berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2021

Kab. Oki, SMN - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil menggeber performa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari predikat CC pada tahun sebelumnya menjadi B berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2021. SAKIP Pemkab OKI mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dari 57,54 pada tahun 2020 meningkat menjadi 60,04 di tahun 2021.

Atas capaian tahun ini Bupati OKI, H. Iskandar, SE diganjar penghargaan Sakip 2021 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diterima Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H.M. Dja'far Shodig di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta. Selasa (05/04/2022).

"Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya," ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta. Dijelaskannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

"SAKIP itu tentang perencanaan yang baik, bagaimana menyusun sasaran kinerjanya, bagaimana merencanakan program kegiatannya, kemudian bagaimana penggunaan anggarannya. Jadi memang keseluruhan sistem," terang Erwan.

Capaian yang diraih Kabupaten OKI menurut Wakil Bupati OKI, H.M. Dja'far Shodiq merupakan upaya untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban atas hasil (out come) penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

"Rapor SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB tidak hanya menitik beratkan pada nilai yang diberikan, namun yang terpenting adalah bagaimana kemampuan kita sebagai instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelavanan dan kemanfaatan bagi masyarakat." Terang Wabup OKI, setelah menerima hasil SAKIP 2021.

Wabup Shodig mengatakan bahwa Rapor SAKIP ini menjadi tool untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah.

"Terima kasih atas kinerja seluruh elemen pemerintahan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja Pemkab Ogan Komering Ilir semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya'", ujar Shodiq.

Penghargaan ini ujar Shodiq akan makin mendorong Pemkab OKI untuk memberi layanan publik.

"Jangan cepat puas, jadikan capaian baik ini sebagai motivasi yang dibuktikan dengan kinerja nyata dan karya bermanfaat lainnya," tutup Shodiq. (bur)

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Presiden Jokowi Teken PP. . .

Sambungan dari hal. 1

dan gaji ke 13 untuk ASN, TNI, Polri, ASN daerah, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Pejabat Negara," ungkap Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan virtual, Kamis (14/4/2022).

Selain pemberian THR dan gaji ke-13, para abdi negara akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja 50%.

"Serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja," papar Jokowi.

Jokowi mengatakan kebijakan ini diterbitkan sebagai wujud penghargaan kepada aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Di sisi lain, hal ini diyakini Jokowi dapat menambah daya beli masyarakat di tengah pandemi.

"Diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Jokowi.

Dia melanjutkan ketentuan teknis pembagian THR dan gaji 13 akan diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan untuk pencairan yang bersumber APBN, dan juga aturan Pemerintah Daerah untuk pencairan yang bersumber dari APBD.

THR PNS Mulai Cair H-10 Lebaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2022.

Pemberian THR pada tahun 2022 akan diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat, termasuk 50 persen dari tunjangan kinerja (bagi yang memiliki tukin), bagi ASN dan pensiunan.

Sementara itu, untuk Pemerintah Daerah (Pemda) besarannya adalah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah masing-masing.

"Pencairan THR direncanakan mulai H-10 lebaran," ujar Sri Mulyani, Sabtu (16/4/2022). (dtk/bsns)

Menko PMK Muhadjir Effendy

Cegah Penyebaran Covid-19 Saat Mudik, Pemerintah: Masyarakat Harus Taat Prokes

Jakarta, SMN - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan masyarakat yang akan mudik harus mematuhi protokol kesehatan dan sudah divaksin guna mencegah penyebaran kasus Covid-19.

"Hal ini supaya ketika berangkat ke daerah tujuan, kondisi betul-betul sehat dari Covid-19 dan datang tidak membawa oleh-oleh Covid-19," kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Persiapan Mudik Lebaran 2022, yang dipimpin apolri Listyo Sigit Prabowo, di Markas Besar Kepolisian Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (14/04/2022).

Menurut Muhadjir, pemerintah melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan mudik Lebaran 2022 agar berjalan aman, lancar dan sehat. Persiapan itu dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor yang sudah dua kali dilaksanakan.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk agar semua yang akan mudik menyiapkan diri dengan vaksin booster yang ketiga kalinya," kata Menko PMK.

Selain kewajiban vaksin, masyarakat juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari lonjakan kasus Covid-19 pascalebaran.

Menko PMK menambahkan, pemerintah telah menjamin perjalanan mudik aman dan lancar termasuk ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji, dan bahan pokok.

"Kami berupaya betul menjamin bahwa perjalanan ini, baik ketika berangkat maupun kembali lagi akan lancar selamat dan betul-betul mendapatkan kegembiaraan bertemu dengan sanak saudara," ungkap Menko PMK.

Sementara itu Wakapolri Gatot E. Pramono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pos pengamanan, pos pelayanan terpadu dan gerai vaksinasi di titik keramaian dan kerawanan.

"Dengan menurunkan 144.392 personil, kita juga akan melakukan cipta kondisi sebelum dan sesudah operasi ketupat terhadap gangguan keamanan yang mungkin muncul dan melakukan percepatan vakinasi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, dalam rangka percepatan vaksinasi untuk wilayah Jabodetabek diharapkan satu minggu sebelum lebaran vaksinasi booster sudah mencapai 50%, kemudian daerah tujuan mudik yang kebanyakan ke daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta ditargetkan booster sudah mencapai 30%.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan menyatakan, ketersediaan bahan pokok yang dipantau Kemendag dan Badan Pangan Nasional terpantau cukup dan aman.

Lebih lanjut, suplai distribusi BBM dan LPG selama ramadan dan lebaran juga dijamin aman. Dari total prediksi 85,5 juta pemudik, 61,8% akan menggunakan mobil pribadi, motor dan bus, dan yang lainnya angkutan laut dan udara.

"Dengan demikian kami bisa memprediksi peningkatan dari kebutuhan gasoline dan gasoil. Peningkatan tertinggi arus mudik diperkirakan sampai 29%, kemudian ada arus libur wisata sampai 36% dan arus balik 22%," jelas Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke mengatakan, pihaknya telah menyiapkan suplai dan distribusi tambahan untuk infrastruktur armada. Sebanyak 230 unit motor akan menjual BBM ke kendaraan yang terjebak kemacetan baik di tol maupun luar tol.(kntn)

Pemerintah Ungkap Respons Cepat dan Digitalisasi Kunci Tangani Pandemi

Airlangga Hartarto

Jakarta, SMN - Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa respons cepat, digitalisasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya terkait dengan penanganan pandemi, sehingga pandemi dapat terkendali dan sektor perekonomian yang kembali tumbuh positif.

"Kunci keberhasilan dalam menangani pandemi adalah respons cepat, digitalisasi, dan peran aktif seluruh pihak dari berbagai sektor," kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Jumat (15/4).

Respons cepat yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi yakni dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-CPEN) yang memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan aspek kesehatan dan ekonomi serta memudahkan adaptasi kebijakan di tengah pandemi.

Selain itu, respons cepat lainnya di aspek kesehatan yakni pembatasan mobilitas, kampanye memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta penyediaan pengobatan dan vaksinasi.

Digitalisasi

Digitalisasi juga merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi dan diimplementasikan melalui integrasi aplikasi PCare, PeduliLindungi, SMILE, dan SMDV guna mencatat hasil tes, rekam medis, status vaksinasi hingga rantai suplai logistik untuk penanganan pandemi. Penggunaan teknologi digital tersebut dinilai sangat membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memantau dan mengambil keputusan berdasarkan data riil yang diperbaharui setiap saat.

"Pemerintah juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dari berbagai sektor mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga internasional," tutur dia.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, secara rutin dilaksanakan setiap minggu guna menjadi katalis dalam percepatan pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi terlebih pada sektor ekonomi.

Kolaborasi global juga dilakukan pemerintah dengan berbagai Lembaga Internasional seperti WHO, IFRC, UNDP, dan UNICEF yang telah membantu Indonesia dalam penyusunan pedoman teknis dan pendampingan pelaksana teknis pendistribusian vaksin secara cepat dan tepat sasaran.

Selain kolaborasi global dengan lembaga internasional, pemerintah juga melakukan sinergi dengan beberapa negara lain seperti halnya Australia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Emirat Arab guna memperoleh kebutuhan logistik seperti vaksin, oksigenator, dan obat-obatan secara cepat sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga telah mendorong pertimbangan diperlukannya tindakan pencegahan melalui Presidensi G20 Indonesia. Dengan dibantu oleh World Bank dan WHO, Forum G20 menyusun Global Health Fund yang merupakan kerjasama penghimpunan dana untuk membangun ketahanan sistem kesehatan global.

"Di samping itu, saya berharap agar Forum G20 juga dapat menjadi fasilitator untuk koordinasi pencegahan dan penanggulangan berbagai persoalan pandemi," ucap dia, dikutip Antara.(mdk)

Puan: Pemerintah Harus Gerak Cepat Optimalkan Diplomasi Agar Dapat Kuota Haji Maksimal

Jakarta, SMN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mempersiapkan pelaksanaan Ibadah Haji 2022 menyusul pemerintah Arab Saudi yang telah memutuskan menaikkan jumlah jemaah haji tahun ini menjadi satu juta orang.

"Dengan dibukanya kuota haji mencapai 1 juta jemaah tahun ini harus disambut dengan baik dan dipersiapkan sebaik mungkin," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (15/4/2022).

Menurutnya, gerak cepat pemerintah harus segera dilakukan agar kuota yang didapat dapat maksimal. Termasuk juga perlu memastikan persiapan teknis sehingga jamaah haji terlayani dengan baik

"Pemerintah harus bergerak cepat untuk memaksimalkan diplomasi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota maksimal," imbuhnya.

Terlebih, kata Puan, umat muslim di Indonesia sudah lama menanti agar bisa kembali menunaikan ibadah haji. Sebab, selama dua tahun berturut-turut Indonesia tak bisa memberangkatkan umat muslim ke tanah suci karena ibadah haji digelar terbatas akibat pandemi Covid-19.

Sebagaimana tercatat pada 2020, Arab Saudi hanya membuka 1.000 kuota jemaah haji bagi warganya. Lalu tahun selanjutnya kuota meningkat menjadi 60.000, namun masih dikhususkan bagi warga Arab Saudi.

Biaya Haji 2022

Atas hal itu, Puan menyampaikan jika dirinya telah meminta Komisi VIII DPR untuk langsung menggelar rapat dengan Menteri Agama guna menindaklanjuti keputusan Arab Saudi tersebut.

Dengan hasilnya, DPR dan Menag pun sudah mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 sebesar Rp 39.886.009. Selanjutnya, Puan mengingatkan tugas pemerintah untuk melobi Arab Saudi dan memastikan agar Indonesia mendapatkan jumlah kuota haji yang memadai.

"Bahkan jika memungkinkan, Indonesia bisa diberi kuota tambahan dari sisa kuota haji negara lain yang tidak terserap," kata Puan.

Selain masalah kuota haji, Puan juga mengingatkan pemerintah bahwa persiapan pemberangkatan jemaah dan penyediaan fasilitas disana harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sukseskan Ibadah Haji

Berkaca pada pengalamannya saat menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 2014-2019 lalu, Puan mengingatkan semua pihak harus bergotong royong guna mensukseskan penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini.

"Jamaah Haji asal Indonesia harus dapat menikmati berbagai layanan mulai dari yang pokok hingga ke masalah terkecil sekalipun, termasuk terpenuhinya ketersediaan air minum bagi para Jamaah dalam menghadapi badai panas di Tanah Suci," ujar Puan.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI memutuskan biaya Haji yang ditanggung calon jemaah Haji tahun 2022 sebesar Rp39.886.009 per jemaah. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.

Biaya haji tambahan ini tidak dibebankan kepada calon jemaah Haji. Tambahan biaya jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M akan dibebankan kepada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah Haji tahun 2020 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI.

"Kami menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp81.747.844 terdiri dari Bipih rata-rata sebesar Rp39.886.009," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Rabu (13/4).(lp6)

Jemaah haji di Masjid Nabawi, Madinah.

INFO
Bagi Teman - Teman Wartawan
Yang Belum Dapat Media
Mari Bergabung dengan Kami di
Suara Media Nasional

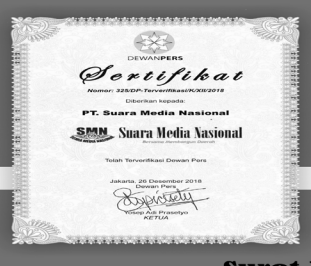

Anda Seorang Pemuda Pemudi Yang Energik, Suka Tantangan
Pekerja Keras, Mudah Berkomunikasi dan Pantang Menyerah ?
Ayo Bergabung Dengan Kami

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional

Wartawan & Marketing
Syarat :
- Pria/Wanita Usia Minimal 20 tahun
- Ijazah Minimal SMA atau Sederajat
- Memiliki Kendaraan/Motor Sendiri, Sim C dan Kamera
- Mau Ditempatkan Di Wilayah yang Ditentukan
- Bisa Bekerja 1 Team

Di Utamakan Untuk Wilayah :
Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Bangkalan, Sumenep,Pamengkasan, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Magetan, Malang, Bali, Kalteng, Kaltim Kalbar, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo.

Kirimkan Lamaran Lengkap anda Ke :
Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri No. 143 Pesantren - Kota Kediri
Email : Suaramedianasional@gmail.com
Telp. : (0354) 2897707, 081333002657

Pimpinan Redaksi
Kanti Wiyoto

Surat Kabar Umum
Suara Media Nasional
Bersama Membangun Daerah
Edisi 514/ XIV /18 April - 8 Mei 2022

Pemprov Jatim Siap Wujudkan Mudik Aman, Sehat, Selamat, Tertib dan Lancar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau infrastruktur meliputi kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan untuk menunjang Mudik Aman, Sehat, Selamat, Tertib dan Lancar

Surabaya, SMN – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemprov Jatim melakukan upaya maksimal untuk mendukung kelancaran mudik lebaran tahun 2022.

Salah satu bentuknya adalah memastikan bahwa kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan dalam kondisi baik, dan bisa mendukung penyiapan dan perwujudan mudik yang aman, sehat, selamat, tertib dan lancar.

Untuk itu, pihaknya secara khusus memerintahkan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, untuk melakukan persiapan yang matang. Seperti memastikan jalan milik provinsi dalam kondisi baik untuk dilewati pemudik, serta melakukan antisipasi daerah rawan bencana dan kesiapan personil dan alat berat.

"Berdasarkan data yang ada, ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim panjangnya mencapai 1.421kilometer dan panjang jembatan 10.870 meter. Dari panjangnya jalan itu, kemantapan jalan provinsi mencapai 89,61 persen," kata Gubernur Khofifah, Jumat (15/4).

Dengan rincian 57,74 persen dalam kondisi baik, 31,84 persen kondisi sedang, 7,13 persen kondisi rusak ringan dan 3,26 persen rusak berat.

"Dengan ini, maka insya Allah jalan provinsi maupun jembatan yang ada di kewenangan kami, dalam kondisi yang siap menyambut dan mendukung kelancaran kegiatan mudik lebaran masyarakat," tambahnya.

Sedangkan untuk lokasi rawan bencana, jelas mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur juga telah melakukan pemetaan. Ada beberapa daerah yang rawan terjadi banjir dan longsor yang harus diwaspadai oleh pemudik.

Untuk daerah rawan banjir, seperti di wilayah perbatasan Kota Bojonegoro-Pajeng di Kabupaten Bojonegoro, Pakah-Ponco di Kabupaten Tuban, Arjosari-Purwantoro di Kabupaten Pacitan, batas Kabupaten Situbondo dan batas Kota Bondowoso, Jalan Trunojoyo di Kabupaten Ponorogo, Jalan Imam Bonjol dan Sampang-Omben di Kabupaten Sampang.

Sedangkan untuk lokasi rawan longsor, diantaranya bisa terjadi di wilayah Babat sampai batas Kabupaten Jombang, Jalan Raya Cangar dan Jalan Trunojoyo di Kota Batu, batas Kota Magetan-Cemorosewu Kabupaten Magetan, Arjosari-Purwantoro di Kabupaten Pacitan.

"Dengan letak geografis Jawa Timur yang memiliki banyak pegunungan dan dataran tinggi, terdapat wilayah yang rawan terjadi longsor. Seperti di Pacitan, Ponorogo, Pasuruan, Bondowoso dan Situbondo," jelasnya.

"Untuk itu, kami meminta pemudik nanti untuk berhati-hati saat melewati jalan ini. Saya juga minta untuk dipasang rambu-rambu peringatan di daerah yang rawan longsor," imbuh Khofifah.

Khofifah menambahkan, saat ini di jalan provinsi juga ada satu jembatan yang rusak dan tidak bisa dilewati yakni Jembatan Kutorejo. Jembatan ini menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Nganjuk. Rusaknya jembatan ini akhirnya mengakibatkan terputusnya akses jalan provinsi.

Namun demikian, bagi masyarakat yang ingin melewati jalan ini saat mudik lebaran nanti, tidak perlu khawatir karena Dinas PU Bina Marga Jatim akan memasang jembatan bailey.

"Pada saat lebaran nanti, jembatan bailey sudah bisa dilewati namun tidak untuk kendaraan berat seperti truk. Kendaraan berat akan diarahkan ke jalan alternatif," tukasnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, selama masa lebaran 2022 Pemprov Jatim juga membuka Posko Lebaran Jalan Provinsi diberbagai titik. Posko-posko itu berdiri disemua UPT Bina Marga dengan ada penanggungjawab masing-masing daerah. UPT Bina Marga itu tersebar di Bojonegoro, Madiun, Pacitan, Mojokerto, Kediri, Surabaya, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Banyuwangi dan Jember.

Di setiap posko juga disiapkan alat berat yang siap digunakan 24 jam. Seperti wheel loader, bulldozer, dump truck, gergaji mesin, tandem roller 2ton dan alat berat lainnya. "Semoga mudik lebaran nanti lancar, aman, sehat, selamat, dan tertib. Dan yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan dan sudah vaksin booser. Kami minta sungguh-sungguh Jangan pernah abaikan prokes saat berkumpul bersama keluarga tercinta," pungkasnya. (*)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau infrastruktur meliputi kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan untuk menunjang Mudik Aman, Sehat, Selamat, Tertib dan Lancar

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau infrastruktur meliputi kondisi jalan-jalan provinsi maupun jembatan untuk menunjang Mudik Aman, Sehat, Selamat, Tertib dan Lancar

Buah Kerja Keras Gubernur Khofifah Galakkan Ekonomi Syariah, Jatim Berhasil Borong Tiga Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah 2022

Surabaya, SMN - Getolnya upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mengungkit ekonomi di Jatim dengan memajukan ekonomi syariah membuahkan hasil yang mengagumkan.

Kerja keras menggerakkan industri halal, keuangan dan ekonomi syariah yang dilakukan Gubernur Khofifah mengantarkan Provinsi Jawa Timur meraih tiga penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2022.

Dari total tujuh kategori penghargaan Adinata Syariah 2022, yang merupakan gelaran Majalah Infobank berkerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Syariah Indonesia (BSI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Jatim memborong tiga gelar juara.

Detailnya, Jatim meraih penghargaan Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah, Juara 1 Kategori Pendidikan Ekonomi Syariah dan Juara 2 Kategori Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Secara khusus, Gubernur Khofifah menghadiri langsung penyerahan penghargaan Anugerah Aninata Syariah Award 2022 tersebut di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (14/4).

"Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pada kami Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, anugerah ini saya dedikasikan untuk pelaku Baitul Maal Tanwil (BMT), koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KPPS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Bank Wakaf Mikro. Mereka ini yang telah mendedikasikan seluruh daya upayanya untuk memberikan sapaan kepada para pelaku usaha di Jawa Timur," ujarnya.

Khofifah menyampaikan, potensi industri halal dan keuangan syariah di Jatim sangatlah besar. Terlebih Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sangat berpeluang mengambil kesempatan untuk mendorong sekaligus mengembangkan produk halal yang memiliki nilai ekspor.

Saat ini, Jatim memiliki jumlah institusi / lembaga sektor keuangan mikro syariah yang terdiri dari BMT sebanyak 626 institusi yang terdaftar secara resmi. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KPPS) di Jatim telah ada sebanyak 1.971.

Sedangkan, LKMS ada 24 institusi, Bank Wakaf Mikro sebanyak 15 institusi dengan aset sebesar Rp. 64.03 miliar. Juga, koperasi total (syariah dan non syariah) sebesar 22.872 institusi resmi dengan total aset sebanyak Rp. 49,59 triliun.

"Artinya ekosistem pengembangan produk halal dan dukungan ekosistem syariah telah terbangun di Jawa Timur," tegas Khofifah.

Begitu juga dengan Pendidikan Ekonomi Syariah dimana Jatim juga meraih juara satu dalam ajang ini. Khofifah menyebut bahwa Jatim terus fokus mengakselerasi literasi keuangan masyarakat melalui sejumlah program.

Salah satu program unggulan Jatim adalah KEJAR yaitu Satu Rekening Satu Pelajar. Dimana program ini menyasar langsung kalangan pelajar. Yang diharapkan pendidikan ekonomi syariah diajarkan dan diaplikasikan sedini mungkin saat mereka duduk di bangku sekolah.

Tak hanya itu, Jatim juga di dukung sebanyak 72 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta. Sehingga pertumbuhan rekening pelajar tahun 2019 sampai 2021 tumbuh 5 persen, maka indeks inklusi keuangan Jawa Timur saat ini mencapai 92 persen.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk OJK, BI dan para pelajar yang telah mendukung tercapainya Pendidikan Ekonomi Syariah," imbuhnya.

Di sisi lain, Direktur KNEKS Suttan Emir Hidayat menyatakan, salah satu dasar penilaian atas diberikannya Adinata Syariah adalah regulasi dan perencanaan ekonomi syariah, program dan implementasi ekonomi syariah hingga realisasi ekonomi syariah di daerah.

Selain itu, sektor keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan ekonomi syariah, pengembangan ekonomi pesantren, serta ekonomi hijau dan berkelanjutan juga menjadi salah satu indikator penilaian.

Atas dasar inilah, Suttan menyampaikan bahwa dewan juri memberikan penghargaan kepada provinsi dengan harapan bisa mengembangkan potensi ekonomi syariah maupun industri halal bisa mendukung industri halal, ekonomi dan keuangan syariah.

"Semoga pemerintah daerah bisa menjadi ujung tombak dalam mempercepat perluasan ekonomi dan keuangan syariah guna membumikan ekonomi syariah di masing masing daerah dan memberikan kontribusi bagi Indonesia maupun dunia," jelasnya.

Sementara itu, Chairman Infobank Eko B Supriyanto melaporkan, bahwa keberadaan Ekonomi Syariah harus di dukung dari pusat hingga daerah guna mewujudkan ekonomi Indonesia dengan lebih baik.

Oleh karenanya, pemerintah daerah harus di dorong agar potensi ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti pada potensi semata melainkan bisa menjadi kenyataan. Bahkan, saat ini Indonesia bukan lagi berada pada rangking empat potensi produk halal tapi sudah meningkat menjadi peringkat dua dunia.

Kondisi tersebut harus ditangkap menjadi peluang dimana tahun 2023 Indonesia akan menjadi episentrum dari produk halal. Potensi 2 trilliun US Dollar yang bisa diambil oleh Indonesia.

Mewujudkan impian akan menjadi kekuatan baru ekonomi di masa mendatang. Ke depan ekonomi halal harus di dorong selain kemajuan teknologi hingga bonus demografi. Inilah alasan kami memberi penghargaan kepada kepala daerah agar mendorong pemerintah untuk mewujudkan cita cita besar bangsa," pungkasnya. (*)

Jelang Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2022, Wagub Emil Optimalkan Vaksinasi bagi Lansia

Surabaya, SMN - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak akan mengoptimalkan vaksinasi bagi masyarakat di Jatim terutama lanjut usia (lansia). Selain pemenuhan capaian target, vaksinasi juga sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran mulai 29 April hingga 6 Mei 2022.

"Vaksinasi lansia harus digenjot supaya mencapai target. Begitu pula vaksin booster diharapkan di daerah tujuan mencapai 30 persen. Jabodetabek sebagai daerah pengirim diharapkan 50 persen," ujar Emil panggilan akrab Wagub Jatim itu seusai mengikuti rapat persiapan arus mudik dan arus balik secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri RI Jenderal Listyo Sigit dan dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja di Polda Jatim, Kamis, (14/4).

Didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dan Kasdam V Brawijaya Piek Budyakto, Wagub Emil mengaku, vaksinasi dosis kedua bagi lansia belum mencapai target. Maka, momentum mudik dan arus balik bisa dimanfaatkan.

"Mohon kerjasama dan dukungan seluruh pihak. Untuk keluarganya yang utamanya sudah lansia, segera untuk diajak mendapatkan vaksinasi," ajakjya.

Apalagi saat arus mudik, menurut Wagub Emil, pemudik cenderung menjenguk orang tua atau lansia. Dengan demikian, vaksinasi bagi lansia menjadi prioritas utama yang ditargetkan 60 persen.

"Ada upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui gerai-gerai yang tersebar di 15 ribu tempat umum. Termasuk objek wisata dan rumah ibadah," tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan Mantan Bupati Trenggalek itu, persiapan arus mudik dan balik lebaran tidak sekadar menggenjot vaksinasi. Melainkan turut mengedepankan protokol kesehatan (prokes) yang harus dilakukan secara masif. Diharapkan, masyarakat tetap disiplin untuk menerapkan prokes di tempat yang dikunjungi.

"Mengingatkan masyarakat menerapkan penguatan protokol kesehatan sehingga masyarakat aman saat beraktivitas. Terima kasih kerjasamanya sehingga kondisi Covid-19 terkendali," jelasnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Wagub Emil sepakat dengan pesan yang disampaikan Kepala BNPB dengan mengaktifkan kembali sistem satgas prokes di desa maupun kelurahan.

"Akan kita upayakan bagaimana di desa melakukan langkah realistis di situasi saat ini," katanya.

Selain itu, di tempat wisata semuanya bisa diaktivasi melalui aplikasi peduli lindungi agar terpantau sehingga bisa terukur. Termasuk antisipasi mitigasi bencana. "Peta jalur mudik bisa dibagikan ke pengemudi untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Nanti akan ditindaklanjuti bersama-sama," pungkasnya.

Terkait kelancaran bahan pokok dan stabilitas harga pokok, Wagub Emil menjelaskan bahwa seluruh lintas sektoral secara bersama-sama ikut melakukan pengawasan dan tindakan. Semua ini dilakukan, supaya tidak ada yang melakukan pelanggaran distribusi barang dan jasa.

"Tadi Menteri Perdagangan dan Pertamina menyampaikan upaya menjaga stabilitas termasuk kelancaran BBM dan kelancaran bahan pokok telah dilakukan pemetaan," tandasnya.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait vaksinasi sebelum mudik lebaran, Wakapolda Jatim Slamet Hadi Supraptoyo berharap, masyarakat yang mudik harus disiplin prokes dan melakukan vaksinasi dosis ketiga.

"Perjalanan jauh, diharapkan masyarakat bisa menjaga kesehatan sehingga merayakan idul Fitri dengan aman dan lancar," ungkapnya.

Sementara itu, Kasdam V Brawijaya Piek Budyakto mengaku, TNI di Jatim akan memperkuat pengamanan yang ada dikelola dengan membantu Polri dan aparat terkait.

Di sentra pelayanan, kata Piek, TNI siap mengerahkan kekuatan dalam pengamanan arus mudik. "Siap mendukung arahan provinsi Jawa timur dalam mensukseskan vaksinasi serta pengamanan arus mudik dan arus balik saat Idul Fitri," ucapnya. (*)